

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

Penelitian dilaksanakan mengikuti rancangan penelitian sebagai metode ilmiah yang sudah dijelaskan pada Bab III. Selanjutnya hasil penelitian dianalisa sebagai temuan lapangan. Bagian ini diawali dengan menyajikan gambaran umum wilayah penelitian Provinsi Bengkulu, khususnya Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang. Tujuannya adalah untuk memberikan landasan pengetahuan tentang keberadaan wilayah pengembangan Kawasan kopi.

Sektor pertanian sangat penting menentukan jalannya roda pembangunan dan perekonomian daerah dan masyarakat Provinsi Bengkulu, karena pada struktur ekonomi Provinsi Bengkulu didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menjadi lapangan usaha utama. Sektor pertanian menyumbang 29,07% dari total PDRB pada triwulan I 2024 (BPS, 2025). Sektor ini menjadi tumpuan dalam penciptaan lapangan pekerjaan. Secara geografis dan kompetitif Provinsi Bengkulu mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif untuk pengembangan perkebunan.

Provinsi Bengkulu terletak di sebelah barat pegunungan Bukit Barisan. Provinsi Bengkulu memiliki luas 20.130,21 km². Jaraknya sekitar 525 km dari perbatasan Sumatera Barat hingga Provinsi Lampung. Dari utara ke selatan, dataran rendah yang relatif Panjang, memanjang dari utara ke selatan dibagian barat. Dibagian timur, banyak bukit dan dataran tinggi yang subur.

Penduduk Provinsi Bengkulu tahun 2024 sebanyak 2.138.044 jiwa yang terdiri atas 1.091.256 jiwa penduduk laki laki dan 1.046.788 jiwa penduduk perempuan. Besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2024 penduduk laki laki terhadap penduduk perempuan sebesar 104,25. Berdasarkan kelompok usia, penduduk Provinsi Bengkulu paling banyak berada pada kelompok usia produktif (15-64 tahun), dan selain itu berada pada kelompok usia non produktif.

Angkatan kerja di Provinsi Bengkulu sebanyak 1.136.573 orang dengan 96,89 % diantaranya bestatus bekerja dan sisanya berstatus pengangguran. Sebanyak 44,44% penduduk usia bekerja, bekerja pada sektor pertanian dan perikanan, 11,54 bekerja di sektor pertambangan dan penggalian dan selebihnya 44,02 % bekerja pada sektor perdagangan besar dan kecil, reparasi mobil dan sepeda, pergudangan, ASN, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan jasa lainnya. 44,44% bekerja disektor pertanian ini menunjukkan bahwa sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian Provinsi Bengkulu dan memberikan peranan terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Provinsi Bengkulu terdiri dari 9 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur. Dari 9 Kabupaten dan 1 Kota, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong merupakan 2 Kabupaten terbesar penghasil Kopi di Provinsi Bengkulu. Tabel 10. Produksi perkebunan rakyat menurut Kabupaten/Kota (Ton), 2023 dan 2024.

Tabel 10. Produksi Perkebunan Rakyat menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Bengkulu (Ton), 2023 dan 2024

Kabupaten/Kota	Kopi	
	2023	2024
Bengkulu Selatan	1.018	943
Rejang Lebong	12.034	14.203
Bengkulu Utara	2.947	2.859
Kaur	4.891	4.665
Seluma	4.908	4.452
Muko Muko	52	49
Lebong	5.156	5.257
Kepahiang	15.894	18.188
Bengkulu Tengah	3.467	3.468
Kota Bengkulu	3	0
Provinsi Bengkulu	50.370	54.084

Sumber : Provinsi Bengkulu dalam angka, 2025

Berikut peta administrasi wilayah Kabupaten Kota di Provinsi Bengkulu,



Gambar 1. Peta administrasi Provinsi Bengkulu Tahun 2023.
(Lokasi Penelitian).

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Rejang Lebong

Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu dari 10 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu yang memiliki luas wilayah sekitar 1550,28 km² dan terbagi kedalam 15 Kecamatan. Secara astronomis, wilayah ini berada pada koordinat 102°19' – 102°57' Bujur Timur dan 2°22'07' – 3°31' Lintang Selatan. Dari sisi geografis, Kabupaten Rejang Lebong terletak di Kawasan perbukitan yang diapit oleh pegunungan Bukit Barisan di bagian barat dan Bukit Kaba di bagian timur. Adapun batas administratif wilayahnya meliputi Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun (Provinsi Jambi) di sebelah utara, Kabupaten Bengkulu Utara di sebelah selatan, Kabupaten Musi Rawas Utara (Provinsi Sumatera Selatan) di sebelah timur, serta Kabupaten Bengkulu Utara di sebelah barat.

Kabupaten Rejang Lebong secara administratif terdiri dari 122 desa dan 34 Kelurahan yang tersebar di 15 Kecamatan. Kecamatan-kecamatan tersebut meliputi: Curup, Curup Utara, Curup Timur, Curup Selatan, Curup

Tengah, Sindang Kelingi, Sindang Dataran, Kota Padang, Sindang Beliti Ilir, Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, Padang Ulak Tanding, Binduriang, Sindang Beliti Ulu dan Selupu Rejang. Dari keseluruhan wilayah tersebut, Kecamatan Padang Ulak Tanding merupakan Kecamatan dengan cakupan wilayah terluas, yakni sekitar 242,97 km², sedangkan Kecamatan Curup memiliki luas wilayah paling kecil, yaitu sekitar 5,21 km². Secara ringkas kondisi geografis Kabupaten Rejang Lebong terlihat pada tabel 11 Luas wilayah, jumlah kecamatan, kelurahan dan desa di Kabupaten Rejang Lebong.

Tabel 11. Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Rejang Lebong

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)	Jumlah	
					Kelurahan	Desa
1.	Curup	Kel. Pasar Baru	5.21	0,24	9	-
2.	Curup Utara	Kel. Tunas Harapan	47.09	3,90	2	12
3.	Curup Timur	Kel. Talang Ulu	10.33	0,22	4	5
4.	Curup Selatan	Desa Lubuk Ubar	35.9	3,16	2	9
5.	Curup Tengah	Kel. Air Bang	19.05	0,56	9	1
6.	Sindang Kelingi	Kel. Beringin Tiga	68.84	8,39	1	9
7.	Sindang Dataran	Ds. Bengko	80.79	4,39	-	6
8.	Kota Padang	Kel. Kota Padang	190.39	11,37	3	7
9.	Sindang Beliti Ilir	Ds. Lubuk Belimbing	167.59	12,70	-	10
10.	Bermani Ulu	Ds. Kampung Melayu	121.14	6,52	-	12
11.	Bermani Ulu Raya	Ds. Tebat Tenong Luar	207.99	9,66	-	10
12.	Padang Ulak Tanding	Kel. Pasar PUT	242.97	14,38	1	14
13.	Binduriang	Ds. Simpang Beliti	44.47	5,83	-	5
14.	Sindang Beliti Ulu	Ds. Lubuk Alai	143.22	8,26	-	9
15.	Selupu Rejang	Kel. Air Duku	165.30	10,42	3	13
Jumlah			242,97	100	34	122

Sumber : Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka, 2023

Dari 15 Kecamatan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong ini terdapat 5 Kecamatan penghasil kopi terbesar ada di wilayah Kecamatan Sindang Dataran, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kecamatan Sindang Kelingi, Kecamatan Selupu Rejang dan Kecamatan Kota Padang. Terlihat pada tabel 12.

Tabel 12. Lima Kecamatan dengan Produksi Kopi (Ton) terbanyak di Kabupaten Rejang Lebong (2022)

No	Nama	Produksi Kopi (Ton)
1.	Sindang Dataran	4.008,10
2.	Bermani Ulu Raya	2.129,15
3.	Sindang Kelingi	2.107,82
4.	Selupu Rejang	1.959,24
5.	Kota Padang	1.598,02

Sumber : Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka, 2023.

4.1.1.1.Kondisi Demografi Kabupaten Rejang Lebong

Penduduk Indonesia didefinisikan sebagai seluruh individu yang menetap di wilayah teritorial Indonesia dalam jangka waktu enam bulan atau lebih, serta mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan namun memiliki maksud untuk menetap. Laju pertumbuhan penduduk menggambarkan besaran persentase peningkatan jumlah penduduk dalam periode waktu tertentu. Adapun kepadatan penduduk merefleksikan jumlah penduduk yang menempati setiap satuan kilometer persegi. Informasi terkait indikator-indikator tersebut disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Penduduk, Laju Pertumbuhan penduduk pertahun menurut Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong dalam ribu jiwa

No	Kecamatan	Penduduk (Ribu Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020- 2022
1.	Curup	27.093	0,26
2.	Curup Utara	19.311	1,95
3.	Curup Timur	26.690	1,99
4.	Curup Selatan	24.037	1,66
5.	Curup Tengah	35.094	0,26
6.	Sindang Kelingi	13.515	0,64
7.	Sindang Dataran	10.417	0,29
8.	Kota Padang	12.473	0,28
9.	Sindang Beliti Ilir	9.164	0,26
10.	Bermani Ulu	13.907	1,10
11.	Bermani Ulu Raya	12.054	1,11
12.	Padang Ulak Tanding	20.076	0,85
13.	Binduriang	9.032	0,72
14.	Sindang Beliti Ulu	11.440	0,20
15.	Selupu Rejang	36.924	1,39

Sumber : Kabupaten Rejang Lebong dalam Angka, 2023

Selanjutnya pada gambar 9 dapat terlihat posisi Kecamatan Sindang Dataran sebagai lokasi penelitian.

Gambar 2. Peta administrasi Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 (Lokasi Penelitian).

Berdasarkan data tabel 13 tersebut terlihat bahwa sebaran laju pertumbuhan penduduk tidak merata disetiap wilayah Kecamatan. Kecamatan-Kecamatan disekitar pusat kota mengalami laju pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu di wilayah Kecamatan Curup Timur, Curup Utara, Curup Selatan, dan Selupu Rejang. Sementara wilayah kecamatan lain laju pertumbuhan penduduk tidak begitu tinggi, hal ini disebabkan karena jumlah penduduk yang memang lebih sedikit dan Sebagian besar lahan digunakan untuk lahan pertanian.

4.1.1.2 Kondisi Iklim Kabupaten Rejang Lebong

Iklim mempunyai peran sebagai faktor kunci yang dapat berpengaruh pada tingkat kesesuaian lahan, produktivitas, serta jenis dan mutu hasil pertanian. Setiap komoditas tanaman memiliki kebutuhan iklim tertentu yang harus terpenuhi pada setiap fase pertumbuhannya. Pada kondisi tertentu, fluktuasi unsur iklim yang ekstrim dapat menjadi faktor pembatas terutama pada fase-fase kritis pertumbuhan. Hal ini karena akan berpotensi menimbulkan penurunan hasil yang signifikan. Meskipun demikian, variasi dan dinamika iklim juga dapat dimanfaatkan sebagai peluang dalam pengembangan sistem dan usaha agribisnis, khususnya yang berkaitan dengan penentuan jenis komoditas, kualitas hasil serta pengaturan waktu panen.

Wilayah Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah iklim tropis basah dengan suhu rata rata $22,9^{\circ}\text{C}$ - $24,8^{\circ}\text{C}$. Kelembaban udara berkisar antara 80 % sampai 92 persen. Intensitas penyinaran matahari pada siang hari bervariasi antara 21,6 – 80,1 persen dengan rata rata 55,7%. Kecepatan angin rata rata pada rentang 2,71 – 4,63 Km/Jam dengan nilai rata rata sekitar 3,5 Km/Jam. Secara musuman, pada periode Oktober hingga Desember, angin dominan bertiup ke Tenggara yang umumnya berasosiasi dengan musim hujan, sedangkan pada bulan Mei hingga Juli cenderung bergerak ke arah barat laut yang berkaitan dengan musim kemarau. Karakteristik Iklim tersebut menunjukkan tingkat kesesuaian yang tinggi bagi pengembangan tanaman perkebunan, khususnya kopi Robusta. Oleh karena itu, dalam penelitian ini focus perencanaan pengembangan kawasan kopi diarahkan pada komoditas kopi robusta.

4.1.1.3. Topografi Wilayah Kabupaten Rejang Lebong

Ditinjau dari aspek Topografi, Kabupaten Rejang Lebong merupakan wilayah perbukitan yang berada pada kawasan pegunungan Bukit Barisan dengan variasi ketinggian mulai kurang dari 100 meter hingga lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut (m.dpl). Sebagian besar wilayah kabupaten ini berada pada elevasi di atas 1.000 m.dpl dengan luas mencapai 67.889 hektare atau sekitar 44,79 persen dari total luas wilayah. Selain itu, karakteristik lahan Kabupaten Rejang Lebong didominasi oleh kemiringan lereng lebih dari 15 persen, yang mencakup area seluas 97,132 hektare atau sekitar 64,09 persen dari keseluruhan wilayah kabupaten, dan tersebar hamper di seluruh kecamatan.

Secara fisik kondisi wilayah Kabupaten Rejang Lebong dicirikan oleh keberagaman jenis Tanah, meliputi Andosol, Regosol, Podsolik, Latosol, dan Alluvial, Tekstur tanah umumnya berada pada kategori sedang hingga lempung, dengan Sebagian kecil bertekstur agak berpasir, serta tingkat keasaman tanah (pH) berkisar antara 4,5 hingga 7,5. Kedalaman efektif tanah pada umumnya berada pada rentang 60 cm hingga lebih dari 90 cm. Di beberapa lokasi ditemukan indikasi erosi ringan dengan tingkat pengikisan tanah sekitar 0 – 10 persen.

4.1.1.4. Lahan Kabupaten Rejang Lebong

Kabupaten Rejang Lebong memiliki potensi sumberdaya alam yang relatif besar dengan luas wilayah mencapai 151.576 hektar. Dari total luas tersebut, sekitar 28,17 persen digunakan sebagai lahan perkebunan dan kebun campuran yang didominasi oleh komoditas kopi, aren, dan kayu manis. Sementara sekitar 14,21 persen lainnya merupakan kawasan hutan. Pada subsektor tanaman pangan, komoditas padi baik padi sawah maupun padi ladang menjadi produk utama, dengan capaian produksi dan tingkat produktivitas yang menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun.

Kegiatan usaha perkebunan di Kabupaten Rejang Lebong pada umumnya didominasi oleh perkebunan rakyat dan perkebunan besar swasta. Salah satu perkebunan besar swasta yang masih beroperasi adalah perkebunan teh yang

terdapat di Kecamatan Bermani Ulu dengan luas sekitar 147,32 Hektare. Sementara itu, perkebunan rakyat mengusahakan beragam komoditas, antara lain kopi, karet, kelapa, kelapa sawit, cengkeh, lada, kakao, kayu manis, kemiri, aren, kapuk, teh, pinang, vanili, tembakau, jahe, nilam dan harami. Baik perkebunan besar swasta maupun perkebunan rakyat tersebar relatif merata di seluruh kecamatan dengan karakteristik komoditas unggulan yang berbeda beda. Namun demikian, secara umum komoditas yang paling dominan adalah kopi, karet, dan aren.

Secara geomorfologis, Kabupaten Rejang Lebong berada di Kawasan yang dikelilingi oleh sejumlah gunung api diantaranya Bukit Daun (2467 m.dpl), Bukit lalang (1306 m.dpl), Bukit Kelang (1959 m.dpl), Bukit Kaba (1938 m.dpl). Bukit Besar (1853 m.dpl), dan Bukit Balai (1683 m.dpl). Potensi bencana erupsi gunung api terutama bersumber dari gunung api aktif yaitu Bukit Daun yang berada di wilayah perbatasan bagian barat, serta Bukit Kaba dan Bukit Besar yang terletak di daerah perbatasan sebelah selatan Kabupaten Rejang Lebong.

4.1.1.5. Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong

Kebijakan pengembangan wilayah memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pengaturan struktur ruang dan pola ruang sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rejang lebong yang mengklasifikasikan wilayah ke dalam kawasan budidaya dan kawasan lindung. Dalam konteks Kawasan lindung di Kabupaten Rejang Lebong, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menetapkan beberapa Kawasan strategis, antara lain: (1). Penetapan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) sebagai kawasan lindung; (2). Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba sebagai kawasan lindung; serta (3) penetapan Kabupaten Rejang Lebong sebagai kawasan andalan di Provinsi Bengkulu dengan potensi utama pada sektor pertanian, industri, perkebunan, perikanan dan pariwisata.

Wilayah Kabupaten Rejang Lebong memiliki arahan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis sebagai berikut:

- 1). Struktur Ruang

- a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), ditetapkan di Kota Curup sebagai ibukota Kabupaten. Kota Curup berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kabupaten, Pusat perdagangan dan jasa dengan jangkauan pelayanan lintas kabupaten., pusat kegiatan industri, Simpul transportasi utama yang menghubungkan jaringan lintas tengah Sumatera menuju Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Palembang, pusat kegiatan pertanian (tanaman pangan dan perkebunan, peternakan dan perikanan budidaya) serta pusat pengembangan pariwisata alam dan agrowisata.
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di Kota Padang yang berperan melayani beberapa kecamatan disekitarnya. Kota Padang berfungsi sebagai pusat pelayanan kegiatan lokal, Pusat pemerintahan Kecamatan, Simpul transportasi jalan rel kereta api dan jaringan jalan raya yang menghubungkan Musi Rawas-Bengkulu, serta pusat perdagangan dan jasa skala lokal.
- 2). Pola Ruang.
- Mengacu pada arahan pola ruang Provinsi Bengkulu, fungsi pemanfaatan lahan di Kabupaten Rejang Lebong, meliputi:
- a. Kawasan lindung dan kawasan suaka alam, yang mencakup hutan lindung Bukit Basa seluas 128, 89 Ha; hutang lindung bukit daun seluas 90.805,07 Ha (wilayah Bersama Lebong, Kepahiang dan Bengkulu Utara), Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba seluas 13.490 Ha (Bersama Kepahiang), Hutang Lindung Bukit Balai Rejang seluas 18.069 Ha (Bersama Kepahiang). Kawasan Suaka alam terdiri dari suaka alam dan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan Cagar Alam (CA) yang meliputi CA Talang Ulu 1 seluas seluas 0,51 Ha dan Talang Ulu 2 seluas 0,006 Ha. Selain itu, terdapat pula kawasan rawan bencana dan Kawasan perlindungan setempat.
 - b. Kawasan Budidaya yang terdiri dari kawasan Perkebunan dengan komoditi utama kopi, lada, karet, kakao dan kelapa seluas 52.993,11 Ha, Kawasan Hutan Rakyat seluas 5.727,29 Ha; Kawasan Permukiman seluas 16.968,93 Ha; serta Kawasan yang didominasi oleh wisata alam.

4.1.2 Gambaran Umum Kabupaten Kepahiang

Semula Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang merupakan bagian dari satu entitas wilayah administratif dimana Kabupaten Rejang Lebong memiliki kantor pusat di Kota Curup, sedangkan Kepahiang berfungsi sebagai pusat kecamatan. Melalui program pemisahan pada awalnya adalah satu Kabupaten bersama yaitu Kabupaten Rejang Lebong dengan ibukota Curup, dan Kepahiang adalah ibukota Kecamatan. Pada tahun 2004 Kepahiang resmi menjadi Kabupaten sendiri. Wilayah Kabupaten Kepahiang mencakup wilayah dengan luas kurang lebih 665 km² dengan pusat administrasi kabupaten terletak di Kecamatan Kepahiang. Dari segi posisi astronomis, daerah ini berada antara 101°55' 19" sampai 03°46'48" Lintang Selatan. Secara Geografis Kabupaten Kepahiang berada di dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian mulai dari 250 m sampai lebih dari 1.600 meter dari permukaan laut. Batas-batas administrasinya meliputi Kabupaten Rejang Lebong dibagian utara, Kabupaten Bengkulu Tengah di selatan. Provinsi Sumatera Selatan di timur serta Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Rejang Lebong di barat.

Karena letaknya didataran tinggi, Kabupaten Kepahiang memiliki iklim yang cukup dingin. Suhu udara rata-rata tidak melebihi dari 26 ° C, dengan puncak curah hujan tertinggi pada tahun 2024 tercatat di Bulan April, dan titik terendah di Juli. Gabungan antar wilayah tinggi dan suhu ini membuat daerah ini ideal untuk budidaya tanaman, khususnya jenis kopi Robusta (Nazir, 2016).

Sebagai hasil dari pemisahan wilayah, Kabupaten Kepahiang kini menjadi 105 desa, dan 12 Kelurahan, yang terdistribusi di delapan kecamatan, yakni: Kecamatan Muara Kemumu, Kecamatan Bermani Ilir, Kecamatan Seberang Musi, Kecamatan Tebat Karai, Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Kabawetan, Kecamatan Ujan Mas, dan Kecamatan Merigi. (Tabel 14). Mayoritas desa dan kelurahan di Kabupaten ini tumbuh sepanjang rute jalan nasional serta jalan Provinsi yang melintasi wilayah Kepahiang.

Tabel 14. Kecamatan dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kepahiang

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Persentase (%)	Jumlah Kelurahan	Desa
1.	Muara Kemumu	Batu Kalung	163,82	23,07	-	8
2.	Bermani Ilir	Keban Agung	93,51	13,17	1	18
3.	Seberang Musi	Lubuk Suhung	107,83	15,19	-	13
4.	Tebat Karai	Penanjung Panjang Atas	66,33	9,34	1	13
5.	Kepahiang	Pasar Ujung	63,68	8,97	7	16
6.	Kabawetan	Tangsi Baru	95,40	13,44	1	14
7.	Ujan Mas	Ujan Mas Atas	106,51	15,00	1	16
8.	Merigi	Durian Depun	13,03	1,83	1	7
Jumlah			665	100	12	105

Sumber : Kabupaten Kepahiang Dalam Angka 2023.

Berikut produksi perkebunan rakyat menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Kepahiang (Ribuan Ton), 2018-2022 pada tabel 15.

Tabel 15. Produksi Perkebunan rakyat menurut jenis tanaman di Kabupaten Kepahiang dari tahun 2018 – 2022.

No	Jenis Tanaman	2018 (Ribuan ton)	2019 (Ribuan ton)	2020 (Ribuan ton)	2021 (Ribuan ton)	2022 (Ribuan ton)
1.	Karet	0,1	0,1	0,1	50,7	51,5
2.	Kelapa	0,1	0,1	0,1	118,7	94,3
3.	Kelapa Sawit	0,2	0,2	0,2	-	-
4.	Kopi	17,5	46,6	19,13	19975,2	21538,2
5.	Kakao	0,1	0,1	0,1	30,3	19,3
6.	Teh	9,4	-	-	-	-
7.	Lada	-	-	-	-	-

Sumber : Kabupaten Kepahiang Dalam Angka 2023

Komoditi kopi merupakan komoditi unggulan di Kabupaten Kepahiang dengan hasil produksi terbesar sepanjang tahun yang tersebar di 8 Kecamatan di wilayah Kabupaten Kepahiang meliputi Kecamatan Muara Kemumu, Kecamatan Bermani Ilir, Kecamatan Seberang Musi, Kecamatan Tebat Karai, Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Kabawetan, Kecamatan Ujan Mas dan Kecamatan Merigi. Berikut data Produksi hasil perkebunan di Kabupaten Kepahiang Tabel 16.

Tabel 16. Produksi perkebunan menurut kecamatan dan jenis tanaman di Kabupaten Kepahiang(Ribu Ton) periode 2021 dan 2022.

No	Kecamatan	Karet		Kopi	
		2021	2022	2021	2022
1.	Muara Kemumu	-	-	6909,33	7175,78
2.	Bermani ilir	9,80	9,80	4792,48	5418,01
3.	Seberang Musi	40,88	41,65	1098,00	1343,65
4.	Tebat karai	-	-	1898,03	2236,18
5.	Kepahiang	-	-	953,30	1007,79
6.	Kabawetan	-	-	973,52	1034,03
7.	Ujan Mas	-	-	2396,60	2758,75
8.	Merigi	-	-	953,60	564,01

Sumber : Kabupaten Kepahiang Dalam Angka 2023

Meskipun Muara Kemumu merupakan kecamatan penghasil kopi terbesar di Kabupaten Kepahiang, tetapi kebijakan pemerintah kemudian memfokuskan pengembangan Kawasan kopi di Wilayah Kabupaten Kabawetan dengan pertimbangan bahwa Kecamatan ini penghasil kopi petik merah dan kultur masyarakat lebih mudah untuk menerima dan melaksanakan program pemerintah, disamping itu Kecamatan Kabawetan juga berbatasan langsung dengan Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong.

4.1.2.1. Kondisi Demografi Kabupaten Kepahiang

Sementara itu data penduduk dan laju pertumbuhan penduduk pertahun menurut Kecamatan di Kabupaten Kepahiang tahun 2024 terlihat pada tabel 17.

Tabel 17. Penduduk, Laju pertumbuhan penduduk pertahun menurut Kecamatan di Kabupaten Kepahiang dalam ribu jiwa periode 2020-2024.

No	Kecamatan	Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan
			Penduduk per Tahun 2020-2024 (%)
1.	Muara Kemumu	14.228	0,49
2.	Bermani Ilir	14.905	0,15
3.	Seberang Musi	8.160	1,19
4.	Tebat Karai	15.305	0,94
5.	Kepahiang	53.883	1,54
6.	Kaba Wetan	13.597	1,26
7.	Ujan Mas	23.709	0,97
8.	Merigi	12.566	1,29
	Kabupaten Kepahiang	156,353	1,10

Sumber : Kabupaten Kepahiang dalam Angka, 2025.

Pada tahun 2024, jumlah penduduk di Kabupaten Kepahiang tercatat sebanyak 156.353 jiwa, sedangkan ditahun sebelumnya yaitu 2023, angkanya mencapai 154.651 jiwa. Angkatan kerja merujuk pada individu yang berusia 15 tahun keatas dan sedang terlibat dalam kegiatan kerja atau mereka yang belum bekerja aktif mencari lapangan pekerjaan. Sementara itu, anak-anak di bawah usia 15 tahun yang mungkin sudah bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak terhitung sebagai bagian dari angkatan kerja. Sebagai elemen demografi, ukuran kerja untuk Angkatan kerja cenderung berfluktuasi seiring dengan dinamika populasi, yang dipengaruhi oleh factor alami seperti laju kelahiran, Angkatan kematian, serta perpindahan penduduk.

Pengangguran didefinisikan sebagai kelompok penduduk dalam usia produktif yang sedang berusaha mencari pekerjaan, menyiapkan bisnis baru, atau merasa sulit mendapatkan kesempatan kerja meskipun belum memulai aktivitas apapun. di Kabupaten Kepahiang jumlah angkatan kerja pada tahun 2024 mencapai 91.931 orang, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 76,5 persen.

4.1.2.2. Kondisi Iklim Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Kepahiang juga beriklim tropis dengan curah hujan rata rata mencapai 233,5 mm/bulan. Daerah ini mengalami bulan kering selama 3 bulan, bulan basah 9 bulan, kelembaban nisbi rata rata 85,21 persen dan suhu harian rata rata 23,87°C dengan suhu maksimum 29,87°C dan suhu minimum 19,65°C. Karena berada di dataran tinggi, iklimnya cukup sejuk, dengan suhu udara rata rata tidak melebihi 25°C. Kondisi suhu dan cuaca ini mendukung untuk pertumbuhan tanaman kopi terutama jenis kopi robusta.

4.1.2.3. Topografi Wilayah Kabupaten Kepahiang

Secara geografis, Kabupaten Kepahiang terletak di dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan, dengan ketinggian mulai lebih dari 250 meter hingga melebihi 1.600 meter di atas permukaan laut. Topografinya dapat diuraikan sebagai berikut; Kawasan berbukit mencakup 19.030 hektar (28,20 persen), Kawasan berbukit seluas 27.065 hektar (40,70%), dan lahan datar hingga berbukit seluas

20.405 hektar (31,10 persen). Berdasarkan tekstur tanah, sebagian besar wilayah Kabupaten Kepahiang bertekstur sedang seluas 35.579 hektar atau sebesar 53,54 persen dari total luas, diikuti oleh tekstur halus seluas 22.621 hektar atau sebesar 34,03 persen dan sisanya seluas 8.262 hektar atau sebesar 12,43 % dengan tekstur kasar. Topografi ini sangat ideal untuk produksi kopi yang optimal, terutama kopi Robusta, di Kabupaten Rejang Lebong dan Kepahiang.

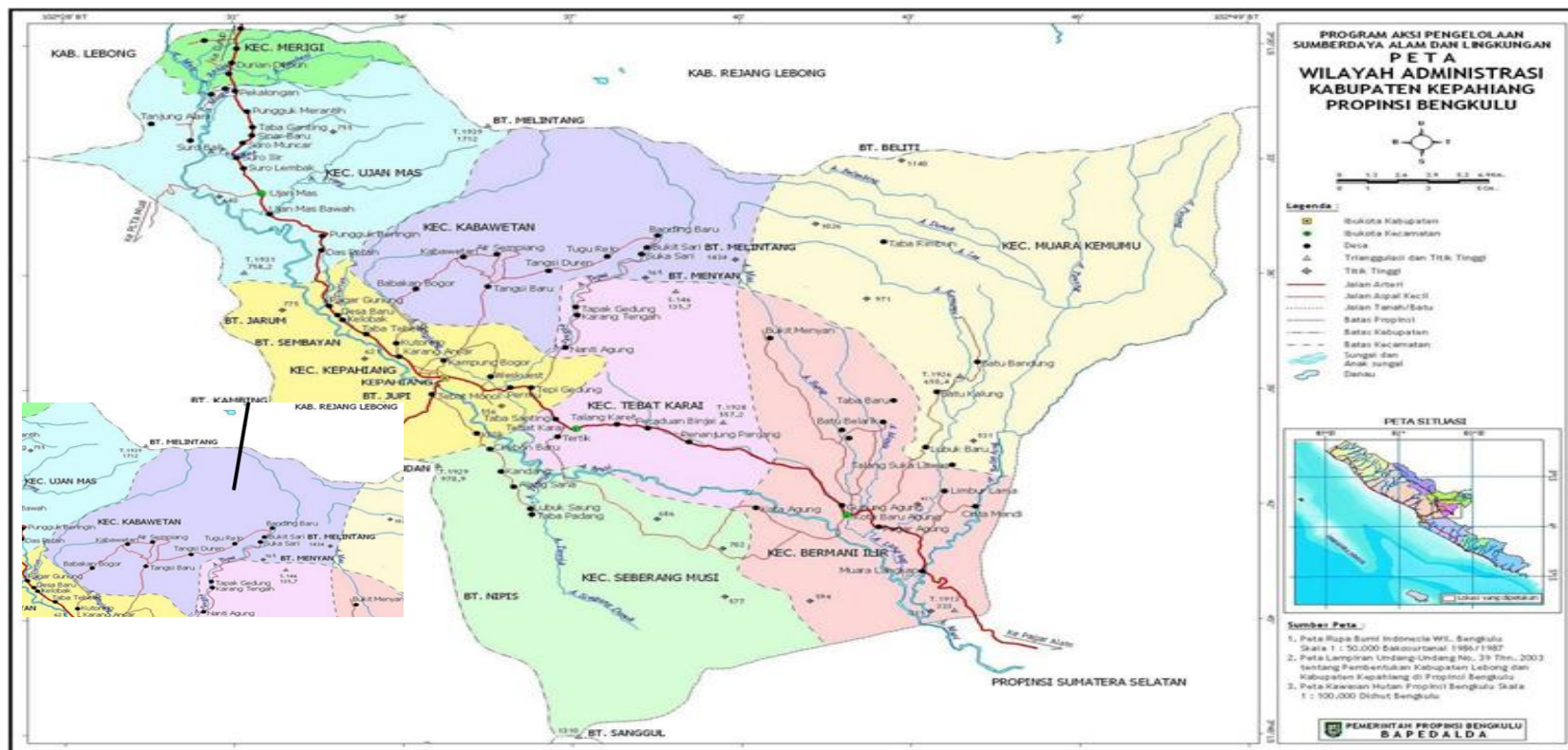
4.1.2.4. Lahan Kabupaten Kepahiang

Dari total luas wilayah Kabupaten Kepahiang yang mencapai 66.500 hektar, terbagi menjadi kawasan budidaya seluas 48.393,69 hektar dan kawasan hutan seluas 18.106,31 hektar. Kawasan hutan tersebut meliputi cagar alam (Pagar Gunung) seluas 3,20 hektar, taman wisata alam (Bukit Kaba) seluas 8.515 hektar, serta hutan lindung seluas 9.588,11 hektar yang mencakup Hutan Lindung Bukit Daun, Hutan Lindung Konak, Hutan Lindung Rimbo Donok, dan Hutan Lindung Konak lainnya. Ketersediaan lahan untuk beberapa komoditas menunjukkan bahwa lahan yang cocok untuk pengembangan pertanian di Kabupaten Kepahiang mencapai 49.075 hektar (69,50 persen), sementara sisanya 21.534 hektar (30,50 persen) digunakan untuk perkebunan swasta, kawasan lindung, organisasi, badan air, dan lainnya.

Perkebunan tanaman yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Kepahiang meliputi kopi Robusta, Kopi Arabika, Kakao, Jahe, Lada, Kemiri, Pala, Aren, dan Teh. Namun, ada faktor pembatas seperti ketersediaan udara yang terkait dengan curah hujan tinggi, retensi hara yang dipengaruhi oleh pH tanah asam dan kandungan bahan organik rendah. Selain itu, risiko erosi menjadi hambatan utama, terutama pada lahan dengan kemiringan lebih dari 25 persen.

Kawasan budidaya tanaman tahunan atau perkebunan adalah kawasan yang memiliki ketersediaan lahan yang baik untuk pengembangan pertanian jenis tersebut. Budidaya tanaman tahunan yang direkomendasikan di Kabupaten Kepahiang antara komoditas lain kopi, kakao, pala, kemiri, dan aren.

Pada gambar 10. dapat terlihat posisi Kecamatan Kabawetan sebagai lokasi penelitian.



Gambar 3. Peta Administrasi Kabupaten Kepahiang Tahun 2024.
 Sumber : Dinas PUPRKP Kabupaten Kepahiang 2024

4.1.2.5. Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kepahiang meliputi sistem perkotaan wilayah yang terhubung dengan kawasan pedesaan dalam jangkauan pelayanannya, serta jaringan infrastruktur kabupaten yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh wilayah. Untuk mendukung aktivitas skala kabupaten, sistem ini terhubung dengan berbagai jaringan, termasuk jaringan transportasi, energi dan listrik, telekomunikasi, sumber daya udara (termasuk daerah hulu bendungan atau waduk dari sungai), dan infrastruktur lainnya.

Pusat kegiatan di wilayah Kabupaten berperan sebagai simpul pelayanan sosial-ekonomi masyarakat kabupaten, yang dapat mencakup: PKN di wilayah kabupaten, PKW di wilayah kabupaten, PKL di wilayah kabupaten, dan PKSN di wilayah kabupaten; serta pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang penentuannya berada di tangan pemerintah daerah kabupaten, seperti: pusat pelayanan daerah (PPK) yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang merupakan pusat organisasi untuk melayani aktivitas antar desa.

Sistem Kabupaten Kepahiang dirancang dengan Fungsi Kegiatan yang jelas agar pusat-pusat tersebut dapat berkembang secara optimal, yaitu: Pusat Kegiatan pelayanan Wilayah Promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Kepahiang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai alokasi ruang untuk kawasan budidaya bagi berbagai kegiatan sosial.
- b. Ekonomi dan kawasan lindung bagi pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi.
- c. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang.
- d. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun, dan
- e. Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang skala Kabupaten.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Kepahiang dirumuskan berdasarkan:

- a. Kebijakan dan strategi ruang wilayah kabupaten dengan memperhatikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi dan nasional.
- b. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah Kabupaten Kepahiang yang dilakukan berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan, penataan Kawasan hutan dan lain lain.
- c. Kebutuhan ruang untuk pengembangan Kawasan budi daya dari Kawasan lindung dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, perkembangan tataguna lahan, kesesuaian lahan, dan penataan kawasan hutan di wilayah ini, dan
- d. Ketentuan peraturan perundang undangan terkait antara undang undang nomor 26 tahun 2007, peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 dan Keputusan Presiden nomor 32 tahun 1990.

Penetapan Kawasan lindung dan Kawasan budidaya sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, dan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990. Batasan mengenai Kawasan lindung dan budidaya adalah sebagai berikut:

- Kawasan lindung adalah kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, nilai sejarah dan budaya bangsa untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.
- Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sumberdaya manusia.

Penetapan Kawasan hutan di Kabupaten Kepahiang yang meliputi Kawasan hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas, mengacu pada kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan kebijakan kebijakan peraturan Menteri kehutanan, tanpa mengubah fungsi dan penggunaan ruangnya.

4.2. Karakteristik Responden

Karakteristik Responden pada penelitian ini dilihat dari Kategori umur, Jenis Kelamin, Pengalaman usaha tani, Pendidikan dan Luas Lahan seperti pada Tabel 18 Karakteristik Responden.

Tabel 18. Karakteristik Responden

No	Karakteristik	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Umur (Tahun)		
	Muda; (< 35)	29	9
	Dewasa ; ($35 \leq X \leq 55$)	287	85
	Tua; > 55	21	6
2.	Jenis Kelamin		
	Laki Laki	323	96
	Perempuan	14	4
3.	Kategori Lama Berusaha Tani (Tahun)		
	4 s/d 17	95	28
	18 s/d 31	228	68
	32 s/d 42	14	04
4.	Pendidikan		
	SD	117	35
	SMP	145	43
	SMA	70	21
	S1	5	1
5.	Luas Lahan (Ha)		
	Kecil; $< 0,5$	7	2
	Menengah; $0,5 - 1$	94	28
	Luas > 1	236	70

Sumber: Hasil Penelitian, 2023 (Data Diolah).

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa umur petani kopi di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang berkisar dari umur < 35 tahun (usia muda) yaitu 39 orang dari 337 orang sampel atau 9 % dari keseluruhan petani yang menjadi sampel. Untuk petani yang berumur kisaran 35 sampai 55 tahun yaitu 287 orang atau 85%, hal ini menunjukkan petani berada pada usia produktif. Menurut Mubyarto (1979), usia produktif menunjukkan bahwa petani dapat optimal dan maksimal berusaha tani sehingga produktifitas kerja juga maksimal. Pada usia ini petani memiliki semangat dan tenaga yang kuat untuk menjalankan usaha tani dan cenderung mau aktif dengan kegiatan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi usaha pertanian mereka dan cenderung menerima inovasi sehingga dalam kegiatan lebih aktif untuk berpartisipasi dan dari segi pemberdayaan usia produktif merupakan kategori usia di mana seseorang mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan usaha tani dan terlibat dalam perencanaan pengembangan Kawasan yang mendukung usaha tani yang mereka lakukan.

Karakteristik berdasarkan Jenis Kelamin dari hasil penelitian diketahui bahwa 96% responden adalah laki-laki, dan 4 % adalah perempuan, Hal ini

dikarenakan laki laki adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarga, sehingga dalam kegiatan usaha tani dan pertemuan pertemuan pada penyusunan perencanaan laki-laki adalah pihak yang dilibatkan. Sangat kecil sekali perempuan yang terlibat dan jikapun terlibat perempuan tersebut adalah perempuan kepala keluarga. Hal ini dikarenakan kepala keluarga mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara itu mata pencaharian keluarga didapatkan dari kegiatan usahatani kopi maka tanggung jawab untuk mendapatkan informasi pada pertemuan pertemuan kelompok ada pada laki laki sebagai kepala keluarga atau perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

Pengalaman usaha tani, pengalaman berusaha tani dihitung dengan mengetahui berapa lama seorang petani telah melakukan pekerjaan/kegiatan berusaha tani. Pengkategorian dibagi menjadi 3 bagian yaitu kategori cukup berpengalaman dengan kategori lama berusaha tani 4 sampai dengan 17 tahun, berpengalaman dengan kategori 18 sampai 31 tahun dan sangat berpengalaman dengan kategori 31 tahun sampai 42 tahun. Lama berusaha tani untuk cukup berpengalaman 28 %, untuk berpengalaman 68% dan sangat berpengalaman dengan lama 32 tahun keatas sebanyak 4%. Pengalaman berusaha tani memungkinkan petani mempunyai banyak pengetahuan dan pengalaman yang belajar dari tradisi kegiatan usaha tani mulai dari proses persiapan lahan, pembuatan teras, penanaman penangung sementara dan tetap, kemudian dilanjutkan pada tahap pembuatan lubang tanam, pengisian pupuk kandang kedalam lubang tanam, proses penanaman kopi dan dilanjutkan pada proses pemeliharaan yang meliputi pemangkasan kopi pada tanaman belum berbuah atau belum menghasilkan (TBM), Pangkas pemeliharaan lepas panen pada saat tanaman sudah berbuah atau menghasilkan sesudah panen. Pengetahuan dan pengalaman berusaha tani kopi yang dimiliki akan membuat petani paham akan kebutuhan untuk upaya perbaikan hasil produksi usaha tani mereka dan ini akan bermanfaat manakala mereka dilibatkan pada proses perencanaan pengembangan Kawasan.

Karakteristik pendidikan berdasarkan hasil penelitian didapatkan data bahwa petani di lokasi rencana pengembangan kawasan 35% berpendidikan SD, 43 % SMP, 21% SMA, dan 1 % Berpendidikan S1, yang menunjukkan bahwa

sebagian besar petani ada pada tataran pendidikan SMP dan SD dengan kata lain masih pada sekolah menengah kebawah. Pendidikan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi pola pikir dan penerimaan seseorang terhadap informasi-informasi baru yang mereka terima yang memotivasi mereka terlibat dalam melakukan kegiatan (Marphy & Priminingtyas, 2019). Semakin tinggi tingkat pendidikan kecenderungan untuk menerima informasi dan tanggap terhadap suatu proses akan menjadi lebih cepat. Tanggap akan informasi dan proses akan memperkaya usulan kebutuhan pada perencanaan pengembangan Kawasan kopi.

Pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki dari proses Pendidikan akan mempengaruhi cara berpikir petani yang sebelumnya tidak atau kurang rasional menjadi rasional. Dengan demikian pemberdayaan didasarkan atas suatu pemikiran bahwa setiap petani hendaknya bersikap dan bertindak rasional. Pendidikan bukan hanya berkenaan dengan persoalan berfikir rasional, tetapi juga mengajarkan tentang etika yang berkenaan dengan persoalan baik dan buruk, bahkan juga mengajarkan tentang persoalan estetika yaitu mengenai keindahan. Melalui media pendidikan diharapkan setiap individu akan berfikir logis, sekaligus pada saat yang bersamaan juga bersikap dan bertindak baik dan senantiasa mempertimbangkan rasa keindahan.

Sementara untuk luas lahan menurut (Sajogyo, 1977) membagi atau mengelompokkan luas lahan menjadi tiga kategori yaitu petani berlahan sempit dengan luas lahan usahatani $< 0,5$ ha, skala sedang dengan luas lahan pertanian $0,5 - 1,0$ ha, dan skala luas dengan luas lahan usahatani $> 1,0$ ha. Setelah di kelompokkan hasil penelitian didapatkan bahwa luas lahan 70% diatas 1 Ha, Kategori luas lahan ini masuk dalam kategori lahan luas dengan kategori luas, tetapi kondisi yang didapatkan hasil produksi belumlah optimal. Hasil pertanian yang belum optimal ini membutuhkan upaya pengembangan dan inovasi agar petani mampu menghasilkan produksi yang lebih optimum sehingga mampu menutupi ongkos produksi dan dapat memenuhi kebutuhan hidup petani. Inovasi teknologi dibutuhkan agar dengan luas lahan dengan kategori luas ini petani tetap mampu menghasilkan produksi yang optimal.

4.3. Keadaan Usaha Tani Kopi di Provinsi Bengkulu

Kegiatan usaha tani kopi yang dilakukan dilokasi penelitian adalah Kopi Robusta. Pada kegiatan usaha tani kopi dilakukan tahapan tahapan yang harapannya ketika tahapan budidaya usaha tani kopi dilakukan dapat menghasilkan produksi kopi yang optimal dengan nilai jual yang kompetitif. Berikut tahapan pelaksanaan kegiatan usaha tani kopi yang dilakukan:

4.3.1 Persiapan lahan

Pada tahap persiapan lahan, 90% petani mengaku mencari data tentang kondisi geografis, ukuran lahan dan jenis tanah, cuaca, serta aspek ekonomi dan sosial-budaya di daerah tersebut. Data ini biasanya diperoleh petani saat rapat kelompok tani bersama penyuluh pertanian atau dengan kehadiran langsung dari perwakilan Dinas Pertanian. Setelah itu dilakukan penanaman pohon pelindung, pembangunan teras, dan pembersihan area lahan.

Berdasarkan wawancara dengan petani, penanaman pohon pelindung sangat penting dalam membangun perkebunan kopi. Pohon pelindung berperan sebagai pupuk alami. Rata-rata 90% petani kopi di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang memilih pohon lamtoro sebagai pohon pelindung. Selain lamtoro, 10% petani lainnya menggunakan sengon (*Paraserianthes falcataria*).

Semua petani melakukan pengolahan lahan mulai dari persiapan awal. Pengolahan ini mencakup pembangunan teras, pembersihan sekitar area tanam, dan penghapusan tanaman yang tidak perlu. Teras dibuat untuk lahan dengan kemiringan tertentu. Pembersihan teras dilakukan untuk lahan miring. Pembersihan hanya dilakukan di sekitar lubang tanam dengan diameter sekitar satu meter. Untuk perkebunan kecil, penghilangan tanaman dilakukan secara manual. Pembersihan biasanya dilakukan tiga bulan sebelum penanaman.

Setelah mengolah lahan, langkah berikutnya adalah petani membuat lubang tanam. Pembuatan lubang tanam untuk bibit kopi biasanya dilakukan satu bulan sebelum tanam. Semua petani melakukannya untuk mendapatkan hasil yang optimal. Penggalan titik tanam menggunakan cangkul hingga ukuran tertentu. Ukuran lubang tanam yang umum adalah sekitar 60 x 60 x 60 cm (panjang x lebar x kedalaman). Sementara itu, tanaman kopi ditanam dengan jarak 3x3 meter atau

2x2 meter, disesuaikan dengan rencana jarak pohon pelindung. Sebelum tanam, petani menambahkan pupuk organik (kompos atau pupuk kandang) ke dalam lubang. Ini dilakukan satu bulan sebelum tanam, lalu lubang ditutup dengan tanah. Menurut petani, semakin lama persiapan dilakukan, semakin baik untuk kesuburan tanah dan hasil kopi di masa depan.

4.3.1 Penanaman

Tahapan penanaman bibit kopi Robusta yang disampaikan oleh petani sangat penting untuk memastikan keberhasilan, dengan memperhatikan beberapa aspek penting. Pertama, pindahkan bibit dari tempat penyimpanan ke lubang tanam dengan sangat hati-hati, pastikan polibag tidak robek atau terlepas dari tanah selama proses, dan lakukan ini sekitar 8 hingga 9 bulan setelah penyemaian. Kedua, waktu ideal untuk menanam adalah di awal musim hujan dan pada pagi hari. Ketiga, sobek polibag saat memasukkan bibit ke dalam lubang. Keempat, pangkas akar utama bibit hingga hidup sekitar 20 cm. Kelima, potong daun bibit sehingga hanya menyisakan bagiannya saja, guna mengurangi penguapan.

1.3.2. Tahap Penyulaman

Setelah penanaman selesai, bibit akan mulai tumbuh dan berkembang. Namun, dalam periode perawatan ini, kemungkinan ada bibit kopi yang rusak atau mati, sehingga petani melakukan penyulaman. Penyulaman dilakukan segera setelah penanaman jika ada bibit yang tidak hidup atau tidak berkembang dalam waktu satu minggu pasca penanaman. Kemudian dilakukan pengawasan pertumbuhan dan penyulaman tambahan jika masih ditemukan bibit kopi yang mati. Proses ini dilakukan petani secara berkala, setidaknya sekali seminggu.

Menurut petani, penyulaman terbaik dilakukan di akhir musim kemarau. Penyulaman berlanjut hingga pohon mulai berbunga, sekitar dua tahun. Cara penyulaman adalah mengganti bibit kopi yang rusak atau gagal dengan bibit baru. Berdasarkan pengalaman petani, 85% dari mereka menyarankan menggunakan bibit sulaman yang usianya sama dengan bibit yang sudah ditanam.

4.3.3. Proses Pendagiran

Pendagiran adalah proses melonggarkan tanah di sekitar tanaman dengan maksud memperbaiki kondisi fisik tanah, meningkatkan sirkulasi udara, dan membuang rumput liar. Petani melakukannya sebanyak dua kali per tahun, dan waktu

pelaksanaannya diselaraskan dengan jadwal pemberian pupuk agar nutrisi dari pupuk dapat diserap lebih baik. Cara pendagiran dilakukan dengan mencangkul

4.3.4. Pemupukan

Tanaman kopi membutuhkan pupuk sebagai sumber nutrisi utama. Kebutuhan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, besi, boron, dan mangan dapat diperoleh dari pupuk organik melalui proses pengomposan, namun jumlahnya bervariasi tergantung pada tahap pertumbuhan tanaman kopi. Untuk tanaman yang masih muda dan belum produktif, biasanya lebih fokus pada nitrogen dan fosfor dengan rasio N, P, dan K masing-masing 2:2:1, sedangkan untuk tanaman yang sudah mulai berbuah, nutrisi yang dibutuhkan adalah nitrogen, fosfor, dan kalium dengan rasio N:P:K (2:2:2).

Petani umumnya memberikan pupuk sebanyak dua hingga tiga kali dalam setahun, disesuaikan dengan fase perkembangan tanaman kopi. Pemupukan dilakukan pada akhir periode kemarau dan akhir musim penghujan. Apabila kondisi tanah sulit atau lingkungan tidak mendukung, maka digunakan pupuk sintetis.

1.3.5. Pemangkasan

Petani kopi melakukan pemangkasan dengan tujuan agar panen mencapai tingkat produksi maksimal. Selain itu, menyederhanakan proses pemanenan. Pemangkasan bagian menjadi tiga jenis utama sebagai berikut:

- A. Pemangkasan Bentuk pemangkasan bentuk dilakukan untuk membentuk tajuk pohon sesuai keinginan dengan pemangkasan tepi. Pemangkasan ini membantu menghambat pertumbuhan pohon ke arah vertikal, sehingga cabang-cabang utama bisa memanjang ke samping. Secara tidak langsung, ini juga mendorong perkembangan cabang sekunder dan pembentukan buah. Pemangkasan pertama dilakukan ketika tinggi tanaman mencapai 120–140 cm (usia 3-4 tahun). Pemangkasan dilakukan setinggi 30-50 cm dari ujung tanaman, disesuaikan dengan laju pertumbuhan dan kesuburan lahan. Setelah dipangkas, biasanya muncul tunas-tunas baru yang tidak diinginkan (wiwilan). Pemangkasan wiwilan dilakukan 2-4 kali per tahun. Pemangkasan kedua dilakukan saat tinggi tanaman kopi mencapai 150-180 cm (usia 7-8 tahun). Sama seperti yang pertama, pemangkasan kedua dilakukan hingga setinggi 30-50 cm dari ujungnya, sehingga tinggi tanaman menjadi sekitar 130 cm. Pada

tahun berikutnya, tinggi tanaman dipertahankan pada 180-250 cm. Teknik pemangkasan ujung bisa dilakukan di bagian ruas tanaman atau tepat di bawah ruas tanaman.

B. Pemangkasan Pemeliharaan pemeliharaan bertujuan menjaga produktivitas buah kopi. Pemangkasan ini dilakukan berdasarkan kondisi tanaman kopi, sebagai berikut:

1. Pemangkasan terhadap tuna yang tidak diinginkan (wiwilan).
2. Pemangkasan berat. Pemangkasan dilakukan pada tanaman kopi yang pertumbuhannya terlalu cepat. Karena pertumbuhan yang terlalu cepat bisa mengganggu tanaman lain karena terlalu lebat atau rimbun. Selain itu, pohon yang terlalu rimbun dapat meningkatkan kelembapan sehingga menurunkan produksi buah. Pemangkasan ini sering disebut koker.
3. Transmisi pengendalian hama dan penyakit. Pemangkasan ini merupakan metode teknis untuk mengurangi penyebaran serangan hama dan penyakit. Pemangkasan dilakukan pada cabang sekunder, cabang primer, serta ujung tanaman yang sudah terinfeksi hama dan penyakit.

C. Pemangkasan Peremajaan Pemangkasan peremajaan berguna untuk memperbaiki karakteristik tanaman yang kurang baik. Peremajaan ini diikuti dengan penyambungan tunas yang membawa sifat-sifat baik pada tanaman yang tidak baik atau perkembangannya kurang optimal. Pemangkasan peremajaan bagian menjadi dua jenis, sebagai berikut:

1. Peremajaan Selektif Peremajaan pemilihan dilakukan terhadap tanaman kopi yang produksinya rendah atau kondisinya buruk dan rusak. Penekanan frekuensi dapat dilakukan dengan dua cara, sebagai berikut:
 - Pangkas tanaman hingga tingginya berkurang menjadi 120-150 cm. Setelah muncul 1-2 tunas baru, lakukan penyambungan dengan top ent (cabang kipas atau cabang pecut). Tujuannya agar pertumbuhan tanaman tidak ke atas, tetapi ke samping. Jika ada dua tunas baru yang tumbuh, penyambungan dengan top dilakukan terhadap tunas yang atas. Sementara itu, tuna bawah disambung dengan top ent (tuna ujung).

- Pemangkasan tanaman induk setelah sambungan tanaman tersebut berhasil tumbuh. Selama proses pemangkasan, petani masih bisa melakukan panen. Pemangkasan dilakukan hingga tinggi tanaman menjadi 120-150 cm. Pemangkasan Radikal Dilakukan dengan memangkas seluruh tanaman hingga setinggi 30 cm. Ketika tanaman sudah dipangkas, biasanya muncul tunas-tunas baru. Salah satu dari tunas tersebut disambung dengan pintu masuk klon dari tunas ujung atau salah satu tunas baru tersebut dan biarkan tumbuh menjadi batang baru yang lebih muda. Peremajaan radikal sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan bersamaan dengan proses penyulaman.

4.3.6 Penyambungan

Sebagai upaya untuk meningkatkan produksi dan produktifitas komoditi perkebunan khususnya kopi robusta Dinas Pertanian melakukan upaya yaitu melalui sosialisasi penyambungan (*grafting*) Kopi Robusta kepada petani, karena dengan upaya ini maka dapat diperoleh peningkatan hasil yang signifikan, yaitu dari rata-rata 640 kg/ha menjadi 1.728 kg/ha.

Menyambung merupakan salah satu tehnik perbanyakan tanaman secara vegetative yang bertujuan untuk meningkatkan produksi. Untuk petani kopi robusta dalam penelitian ini adalah petani kopi robusta yang sudah melakukan proses penyambungan. Penyambungan dilakukan dengan menggunakan entres dari tanaman lain yang berproduksi tinggi atau dengan menggunakan klon yang lebih unggul, bebas hama/penyakit.

Ada tiga cara teknik penyambungan yaitu : a) sambungan celah (*cleft grafting*); b) sambungan rata (*plak grafting*); c) sambungan miring (*kina grafting*). Dari ketiga cara penyambungan tersebut yang paling sering dilakukan adalah cara sambungan celah.

Teknik Menyambung

Secara umum pelaksanaan penyambungan dilakukan sebagai berikut:

- Masukkan ujung batang entras klon yang telah diruncingkan kiri dan kanan (panjang entras + 7 cm) kedalam celah wiwilan yang telah

dipotong dan dibelah. Tinggi potongan batang bawah 15 – 30 Cm, kedalaman belahan celah batang bawah 3 – 4 cm.

- Ikat dan balut sambungan dengan tali raffia, pembalutan dilakukan dari bawah ke atas
- Hasil balutan harus erat dan rapat, sehingga air siraman tidak masuk kedalam sambungan
- Tutup batang atas dan sambungan dengan kantong plastic transparan, lalu ikat agar tidak lepas
- Bila selama 3 – 4 minggu sudah ada tanda tanda pertumbuhan tunas baru, plastik segera dibuka.

Pertumbuhan batang atas tampak subur dan sehat bila sambungan berhasil.

Cara penyambungan

Secara spesifik ada dua cara penyambungan :

- **Penyambungan dengan cara langsung pada potongan pohon kopi tua.**
Caranya : pohon kopi tua dipotong setinggi + 1 s/d 1,25 m dari permukaan tanah kemudian pada potongan tersebut di belah pada bagian samping kulit pohon yang telah dipotong tersebut pada kulit pohon dapat diselipkan entres yang telah disiapkan setelah itu diikat dengan tali plastik (tali raffia) secukupnya kemudian ditutup dengan plastik yang besar disesuaikan dengan besarnya batang kopi yang telah disambung
- **Penyambungan pada tunas dari pohon tua yang telah dipotong.**
Cara kedua ini dapat dilakukan pada tunas dari pokok pohon kopi tua. Caranya pohon kopi yang sudah tua dipotong setinggi + 1 s/d 1,25 m dari permukaan tanah, lalu dibiarkan beberapa hari sehingga pokok pohon atas tersebut mengeluarkan tunas-tunas baru. Setelah tunas mencapai ukuran berdiameter 1 cm, maka tunas tersebut dipotong dan dapat disambung dengan entres yang sudah disiapkan penyambungan dilakukan dengan membelah batang bawah berbentuk V dan pada belahan leher V tersebut dapat disambungkan dengan entres yang telah dipersiapkan setelah itu diikat dengan tali rafia secukupnya dan dibungkus dengan kantong plastik lalu diikat kembali dengan tali plastik.

Setelah tunas entres sudah nampak tumbuh sampai hidup maka kantong plastik dan pembalut sambungan dapat di buka atau dilepas, sehingga tanaman atas dapat tumbuh dengan leluasa. Proses penyambungan kopi dapat dilihat pada Gambar 11.



a. Penyambungan kopi

b. kopi bertunas

c. kopi yang telah berbuah

Gambar 4. Penyambungan kopi, bertunas, dan kopi yang telah berbuah.

4.3.7 Pemangkasan Pohon Pelindung

Jumlah pohon pelindung dalam perkebunan kopi Robusta biasanya mencapai separuh hingga sudut dari total luas lahannya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pohon pelindung yang sering dipakai termasuk lamtoro dan petai cina. Fungsi pohon pelindung seharusnya tidak menghambat pertumbuhan kopi, melainkan mendukungnya agar lebih optimal. Namun jika curah hujan cukup tinggi, pohon pelindung perlu dipotong. Tujuannya adalah untuk mempertahankan tingkat kelembaban udara dan meningkatkan paparan sinar matahari.

Jika pohon pelindung berupa pohon aren, tidak diperlukan pemangkasan. Cukup dengan menjaga kebersihan tanaman dan area sekitar. Jarak penanaman pohon aren biasanya tidak mengganggu tanaman kopi, sehingga pemangkasan pelindung pohon tidak diperlukan.

4.3.8. Pemanenan

Petani mulai memanen kopi yang telah melalui proses penyambungan ketika tanaman berusia 1 tahun. Awalnya, jumlah buah yang dipanen masih kecil, namun kemudian meningkat secara bertahap dari panen tahun pertama hingga tahun

kelima. Kopi hasil penyambungan ini mampu menghasilkan buah setiap bulan, sehingga petani bisa terus memanen bulanan sambil tetap mendapatkan panen besar (panen agung).

Pemanenan dilakukan dengan memetik buah kopi satu per satu menggunakan tangan, kemudian dimasukkan ke keranjang panen yang sudah disiapkan. Pola panen berdasarkan tingkat kematangan buah dibedakan menjadi tiga sebagai berikut:

1. Petik Merah.

Panen hanya dilakukan untuk buah kopi yang sudah berwarna merah (matang).

2. Petik Hijau.

Petik buah kopi yang masih hijau. Petani yang melakukan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keamanan, ekonomi, iklim, dan kebiasaan.

3. Petik Sembarang.

Tingkat kematangan buah kopi dalam satu ranting bervariasi, dari hijau hingga merah (siap petik). Petik ini dilakukan secara acak di dalam ranting yang sama. Ada beberapa faktor yang mendorong petani untuk memanen lebih cepat, yaitu:

1. Faktor Keamanan.

Interaksi antara potensi sumber daya manusia dan pembentukan kelompok tani di sekitar perkebunan bisa menimbulkan risiko pencurian tanaman kopi yang sedang berbuah atau sudah berbuah.

2. Faktor Ekonomi.

Faktor ekonomi merupakan masalah umum yang dihadapi petani kopi di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang. Kesulitan ini bisa diatasi dengan membentuk kelompok koperasi simpan pinjam atau organisasi dengan pola PIR (Pola Hubungan Inti-Rakyat).

3. Faktor Kebiasaan.

Kebiasaan petani yang sering melakukan petik sembarang atau petik hijau bisa menurunkan kualitas kopi, baik rasa maupun aroma. Kurangnya informasi dan pengetahuan petani menjadi penyebab utamanya. Dibandingkan dengan pola petik merah, pendapatan dengan petik hijau bisa turun hingga 20%. Sebagai contoh, untuk mendapatkan 1 kg kopi dibutuhkan 800 biji buah hijau, sedangkan untuk

petik merah hanya 650 biji. Selain perbedaan jumlah produksi, teknik petik merah menghasilkan kualitas kopi yang lebih baik daripada petik hijau.

4. Faktor Iklim.

Selain kebiasaan, petik hijau dilakukan karena kondisi iklim ekstrem dan serangan hama serta penyakit. Biji kopi yang dipetik ini biasanya dicampur untuk menambah bobot biji beras dan menurunkan grade biji kopi. Ciri biji yang kurang baik termasuk warna hitam atau pucat serta bobot yang ringan.

Usahatani kopi di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang merupakan salah satu komoditas tanaman unggulan yang dikelola sebagai perkebunan rakyat. Kelangsungan usaha ini sangat tergantung pada metode budidaya yang diterapkan petani. Sebelum tahun 1995, usahatani kopi di kedua kabupaten masih tradisional tanpa teknologi apa pun; petani menanam kopi, menunggu hingga usia 5 tahun baru menghasilkan, dan membiarkan tanaman tumbuh tanpa pemupukan atau penyemprotan rutin—hanya sesekali membersihkan rumput. Pemanenan dilakukan sekali setahun, yang disebut ngagung. Selama masa tunggu, petani merawat kebun sendiri, membersihkan dan menyiangi, lalu pulang ke dusun atau desa, dan kembali ke kebun jika rumput mulai tumbuh.

Setelah tahun 1995, usahatani kopi di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang mulai menggunakan teknologi penyambungan atau stek (istilah umum di masyarakat). Penyambungan dilakukan dengan memangkas tanaman kopi dan menyisakan batang, lalu menyambungkannya dengan tunas (spin) dari bibit unggul. Teknologi ini memerlukan keahlian khusus, sehingga tidak semua petani bisa melakukannya. Biasanya, petani menyewa tenaga ahli dengan biaya sekitar 2500 per batang, dengan tanggung jawab jika gagal.

Dengan teknologi penyambungan, petani bisa menikmati hasil panen di tahun kedua setelah proses, dan memanen kopi setiap bulan sambil tetap mendapatkan panen agung yang lebih banyak daripada metode tradisional. Petani memanen bulanan, sehingga merasa mendapat penghasilan rutin dari perkebunan mereka.

Secara umum, pembiayaan usahatani kopi di daerah penelitian berasal dari modal pribadi, dibantu pinjaman dari tengkulak desa, dan beberapa orang sudah meminjam dari bank. Pinjaman tengkulak biasanya digunakan untuk perawatan

kopi dan pembelian sarana produksi seperti pupuk, penyemprotan gulma, dan insektisida. Pengembalian dilakukan saat panen, langsung dipotong dari hasil jual ke tengkulak. Sistem ini membuat petani tidak menjual langsung ke pedagang pengumpul di kecamatan atau pedagang besar di pasar Bang Mego di kota kabupaten, karena mereka takut kesulitan akses dana jika butuh bantuan untuk sakit keluarga atau hajatan. Meminjam ke lembaga resmi seperti bank sulit karena persyaratan dan jaminan seperti sertifikat tanah.

Penerapan teknologi untuk meningkatkan hasil perkebunan merupakan salah satu strategi keberhasilan pengelolaan perkebunan, bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ini juga meningkatkan devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha, serta meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, pangsa pasar, serta memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan perencanaan perkebunan yang memberikan arah, pedoman, dan alat pengendalian sesuai UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

4.3.9 Pemasaran

Pemasaran kopi di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang dilakukan melalui berbagai rantai distribusi, mulai dari petani yang memproduksi kopi asalan hingga ke eksportir, dengan melibatkan pedagang perantara seperti tengkulak di desa-desa dan kecamatan, serta pedagang pengumpul di kota-kota. Saat penelitian dilakukan, harga kopi yang diterima petani berkisar antara Rp 20.000 hingga Rp 23.000 per kg, namun saat laporan ini ditulis, harga naik menjadi Rp 55.000 hingga Rp 65.000 per kg. Kenaikan ini dipengaruhi oleh perdagangan internasional dan faktor lainnya.

Dalam rantai pemasaran, sebagian besar petani menjual hasil panennya ke pedagang di tingkat desa dan pedagang jalanan (toke) dalam bentuk beras kopi. Kemudian, pedagang toke membeli beras kopi dari pedagang tingkat desa. Pedagang jalanan menjual seluruh pembeliannya ke pedagang besar yang berlokasi di pasar Bang Mego dan Simpang Sukaraja. Pedagang besar ini selanjutnya mengirimkannya ke pedagang eksportir di Lampung, Medan, atau Palembang, dengan sebagian kecil diserap pasar kabupaten untuk memenuhi kebutuhan lokal

dan diolah lebih lanjut oleh industri rumah tangga pengolahan kopi bubuk di Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, dan sekitarnya

4.4. Proses Perencanaan Pengembangan Kawasan Kopi.

Kebijakan tertinggi yang mengatur tentang perkebunan adalah Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Kemudian sebagai turunan dari regulasi ini ada peraturan menteri pertanian Nomor 56 tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian. di perbaharui dengan Peraturan Menteri Pertanian No 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian berbasis korporasi petani dan di perbaharui kembali menjadi peraturan menteri pertanian Nomor 03 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kawasan pertanian. Pada peraturan menteri ini dijelaskan bahwa kawasan perkebunan merupakan wilayah pembangunan perkebunan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan usaha agribisnis perkebunan yang berkelanjutan. Kawasan perkebunan disatukan oleh kesamaan tipologi agroekosistem, kegiatan ekonomi, sosial budaya dan berbagai infrastruktur pertanian untuk mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha perkebunan. Lokasi kawasan perkebunan dapat berupa kawasan yang secara historis telah eksis maupun lokasi baru yang sesuai tipologi agroekosistem dan persyaratan budidaya bagi masing masing komoditas. Kriteria khusus kawasan perkebunan yaitu sebagai berikut:

- a. Pengusahaan perkebunan dilakukan dalam bentuk usaha perkebunan rakyat dan atau usaha perkebunan besar dengan pendekatan skala ekonomi;
- b. Pengusahaan perkebunan besar dilakukan melalui kerjasama kemitraan dengan usaha perkebunan rakyat secara berkelanjutan, baik melalui pola perusahaan inti-plasma, kerja sama kemitraan perkebunan rakyat-perusahaan mitra, kerjasama pengolahan hasil dan atau bentuk bentuk kerjasama lainnya;
- c. Arah pengembangan usaha perkebunan dilaksanakan dalam bingkai prinsip prinsi pembangunan berkelanjutan, diantaranya: kelapa sawit dengan penerapan sistem Indonesian *Sustainable Palm Oil* (ISPO), kakao dengan penerapan *sustainable cocoa* dan prinsip prinsip pembangunan berkelanjutan lainnya.

Penetapan kawasan pertanian didasarkan pada hasil analisis potensi wilayah, prospek pengembangan komoditas, permasalahan dan kinerja pembangunan

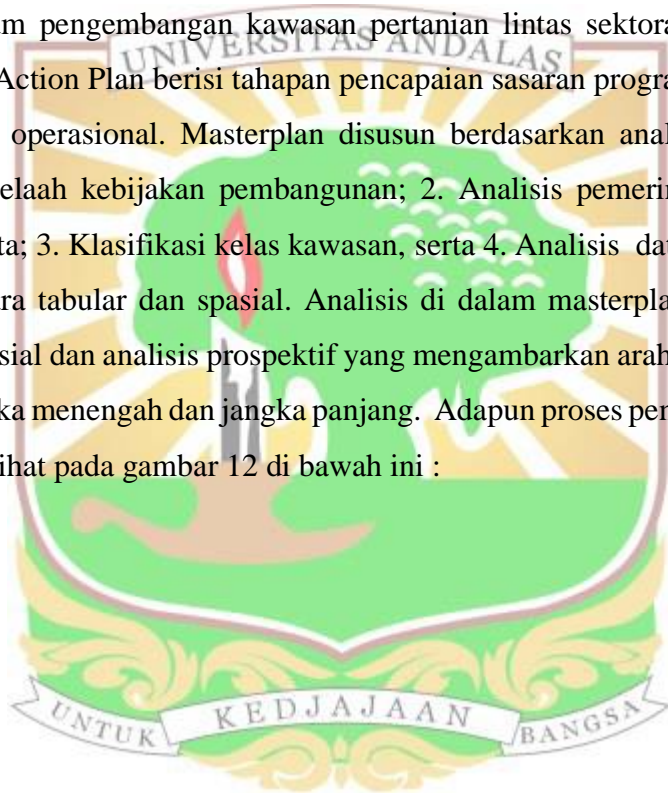
pertanian di daerah serta dinamika kebijakan perencanaan dan penganggaran di tingkat nasional.

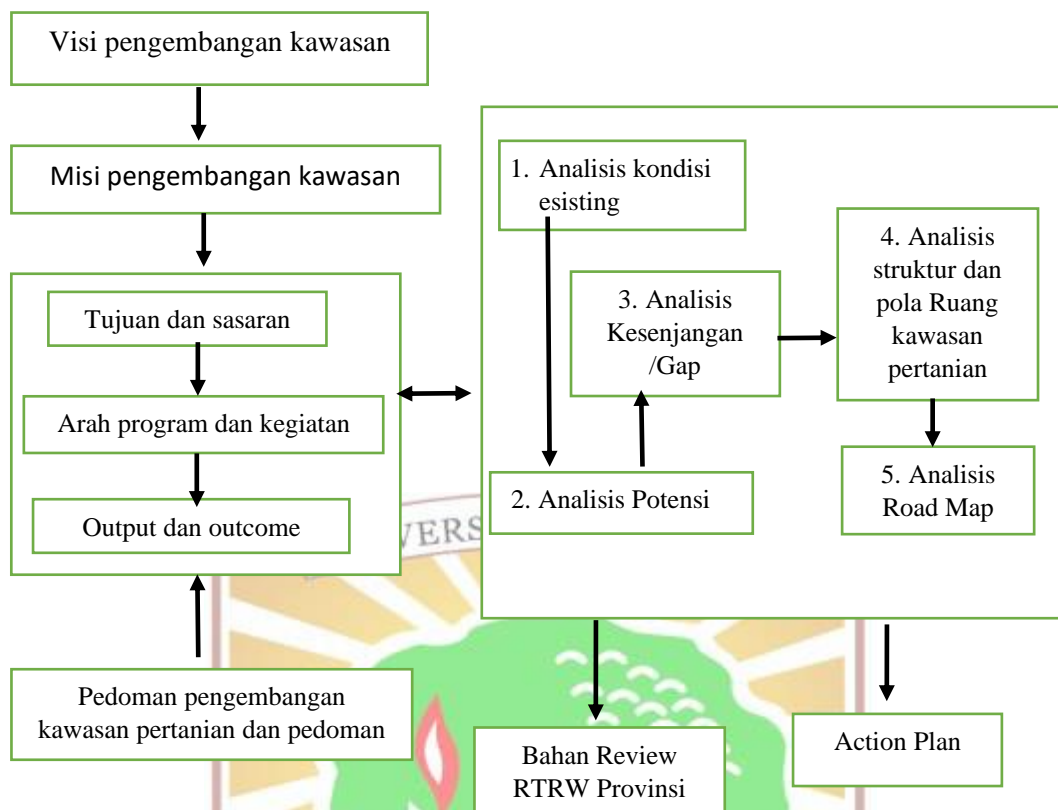
Kawasan pertanian terdiri dari: 1. Kawasan Pertanian Nasional; 2. Kawasan Pertanian Provinsi; dan 3. Kawasan Pertanian Kabupaten/Kota dengan kriteria dan proses penetapan untuk masing masing kawasan sebagai berikut:

1. Kawasan Pertanian Nasional yaitu kawasan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dengan kriteria dan batasan sebagai berikut: a. Mengembangkan komoditas pertanian nasional sesuai dengan arah dan kebijakan Kementerian Pertanian; b. Memiliki kontribusi produksi eksisting yang signifikan atau berpotensi tinggi terhadap produksi nasional; c. Lokasi kawasan pertanian nasional dapat bersifat lintas provinsi/kabupaten/kota; d. Didukung oleh berbagai sumber pembiayaan, terutama dari swadaya masyarakat, investasi swasta, BUMN/BUMD dan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Fasilitasi dukungan pendanaan dari APBN dialokasikan sebagai stimulan untuk mengakselerasi penguatan seluruh sub sistem agribisnis di Kawasan Pertanian.
2. Kawasan Pertanian Provinsi yaitu kawasan yang ditetapkan oleh Gubernur dengan kriteria dan batasan sebagai berikut: a. Mengembangkan komoditas pertanian prioritas provinsi dan atau komoditas pertanian prioritas nasional yang sesuai dengan arah kebijakan kementerian pertanian; b. Memiliki kontribusi produksi eksisting yang signifikan atau berpotensi tinggi terhadap produksi provinsi; c. Lokasi kawasan pertanian provinsi dapat bersifat lintas kabupaten/kota; d. Didukung oleh berbagai sumber pembiayaan, terutama dari swadaya masyarakat, investasi swasta, BUMN/BUMD dan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Fasilitasi dukungan pendanaan dari APBN terutama dialokasikan untuk penyelenggaraan standar pelayanan teknis minimal di bidang pertanian.
3. Kawasan Pertanian Kabupaten/Kota yaitu kawasan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan kriteria dan batasan sebagai berikut: a. Mengembangkan komoditi pertanian prioritas kabupaten/kota dan atau komoditas pertanian prioritas nasional sesuai dengan arah dan kebijakan kementerian pertanian; b. Memiliki kontribusi produksi eksisting yang

signifikan atau berpotensi tinggi terhadap produksi kabupaten/kota; c. Didukung oleh berbagai sumber pembiayaan, terutama dari swadaya masyarakat, investasi swasta, BUMN/BUMD dan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Fasilitasi dukungan pendanaan dari APBN terutama dialokasikan untuk penyelenggaraan standar pelayanan teknis minimal di bidang pertanian.

Dokument perencanaan pengembangan kawasan pertanian, dalam hal ini pengembangan kawasan kopi di Provinsi Bengkulu terdiri dari Masterplan dan Action Plan. Secara garis besar, Masterplan berisi skenario arah kebijakan dan tujuan program pengembangan kawasan pertanian lintas sektoral yang bersifat startegis dan Action Plan berisi tahapan pencapaian sasaran program dan kegiatan yang bersifat operasional. Masterplan disusun berdasarkan analisis teknokratis melalui; 1. Telaah kebijakan pembangunan; 2. Analisis pemeringkatan potensi kabupaten/kota; 3. Klasifikasi kelas kawasan, serta 4. Analisis data dan informasi kawasan secara tabular dan spasial. Analisis di dalam masterplan lebih bersifat analisis potensial dan analisis prospektif yang menggambarkan arah pengembangan kawasan jangka menengah dan jangka panjang. Adapun proses penyusunan master plan dapat dilihat pada gambar 12 di bawah ini :





Gambar 5. Kerangka analisis penyusunan masterplan.

Mengacu pada gambar diatas, terlihat bahwa penyusunan perencanaan kawasan berupa dokumen masterplan sangat terkait dengan analisis terhadap sumber daya, sosial ekonomi dan analisis ruang wilayah dimana kawasan pertanian berada. Ruang lingkup analisis dari masterplan mencakup : 1. Analisis kondisi eksisting; 2. Analisis potensi (daya dukung dan daya tampung wilayah; 3. Analisis kesenjangan (gap); 4. Analisis struktur dan pola ruang kawasan pertanian; dan 5. Analisis road map.

Kelima hasil analisis tersebut kemudian dirumuskan dalam strategi, kebijakan, indikasi program dan kegiatan untuk mengisi kesenjangan yang ada sesuai dengan tahapan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pada pengembangan kawasan kopi penting untuk dilakukan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran pengembangan kawasan pertanian yang meliputi; meningkatnya luas tanam, populasi, produksi, produktivitas, dan kualitas komoditas pertanian serta terjaminnya lahan budidaya produksi komoditas unggulan nasional. Meningkatnya pendapatan petani dan pendapatan pertanian wilayah,

Meningkatnya akses petani terhadap teknologi pelayanan infrastruktur produksi dan pasca produksi, serta sumber pembiayaan. Meningkatnya kapasitas kelembagaan petani, kelembagaan ekonomi petani dan kelembagaan pelayanan pendukungnya, dan terpadunya rencana dan implementasi kebijakan, program kegiatan, pendanaan dan investasi pembangunan kawasan pertanian.

Direktorat Jenderal Perkebunan mendukung pengembangan kawasan melalui kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk mencapai peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan yang berkelanjutan. Kebijakan pengembangan menawarkan pendekatan pembangunan perkebunan yang lebih efisien dan menyeluruh. Kebijakan ini memerlukan kepemimpinan dan kolaborasi erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta peran swasta dan masyarakat pekebun khususnya. Kebijakan pengembangan kawasan ini memungkinkan pemangku kebijakan Pusat dan Daerah untuk membangun kekuatan, baik dari bidang keahlian pemangku kepentingan maupun infrastruktur yang sesuai, serta aspek terkait potensi sumber daya alam, manusia, teknologi, modal, dan ekonomi yang akan membawa kemajuan nyata bagi pembangunan perkebunan di wilayah yang dikembangkan.

Pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan adalah salah satu pendekatan yang diterapkan untuk menjaga kualitas pemanfaatan ruang di subsektor perkebunan dengan mengoptimalkan sinergi intra dan/atau antar wilayah yang memiliki kesamaan agro-ekosistem sehingga utuh secara ekonomi dan teknis, dan menjadi tanggung jawab penuh pemerintah daerah. Oleh karena itu, daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional dituntut untuk bersaing dalam meningkatkan daya saing wilayahnya agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dengan mengacu pada tolok ukur kemajuan pembangunan wilayah yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi, pendapatan per kapita merata, dan tingkat kemiskinan rendah. Pemerintah pusat berfungsi sebagai fasilitator, pemangku kebijakan dan regulasi dalam mendukung pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan, serta berwenang dalam pengawasan dan evaluasi kegiatan pembangunan perkebunan berbasis kawasan yang dilaksanakan di daerah.

Pengembangan kawasan perkebunan merupakan suatu kebutuhan untuk dijadikan acuan dalam menyempurnakan berbagai gerakan/model/*pilot project*

yang pernah dirintis oleh Kementerian Pertanian. Arah kebijakan pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan diperlukan sebagai acuan tahapan pengembangan kawasan yang tertuang dalam bentuk masterplan pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan.

Sebagai upaya mendorong perkembangan wilayah maka pengembangan kawasan perkebunan dilakukan melalui pendekatan komprehensif mencakup aspek fisik, ekonomi dan sosial. Dalam perkembangannya, berbagai pendekatan telah dilakukan. Pada dasarnya pengembangan wilayah atau kawasan ditujukan untuk mengefesienkan pembangunan berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan sebelumnya serta disesuaikan dengan tuntutan dalam kurun waktu tertentu. Strategi mendasar dalam mengembangkan kawasan diawali dengan optimalisasi potensi komoditas unggulan yang telah berkembang di wilayah tertentu, kemudian secara terfokus dan terarah dikembangkan dengan basis pendekatan agribisnis yang memperhatikan keterkaitan hulu hilir secara berkesinambungan. Pengembangan kawasan perkebunan tidak berdiri sendiri, namun lebih merupakan keterpaduan dari berbagai program dan kegiatan pengembangan antar sektor/sub sektor, antar institusi dan antar pelaku yang telah ada di daerah yang terfokus di kawasan.

Perencanaan perkebunan merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan sektoral. Perencanaan perkebunan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan pelaku usaha perkebunan dan partisipasi masyarakat.

Dalam Pengembangan kawasan tidak hanya berdasarkan potensi potensi yang dimiliki tentu juga penting dilihat dan dikaji dari kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan kawasan yang akan dikembangkan, dan hal ini di Provinsi Bengkulu telah diatur dalam Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu 2012-2032 dimana kawasan pertanian disebutkan memuat empat kawasan yaitu berupa: 1. Kawasan peruntukan tanaman pangan. 2. Kawasan

peruntukan hortikultura, 3. Kawasan peruntukan perkebunan, dan 4. Kawasan peruntukan peternakan.

Proses penyusunan dokument perencanaan pengembangan kawasan kopi dimulai dari penyampaian usulan petani pada saat Musrenbangcam. Petani yang dilibatkan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat pada saat musyawarah. Usulan usulan petani kemudian masuk ke dalam SIPD (Sistim informasi pemerintah daerah) disesuaikan dengan SBU (Standar biaya umum). Saran yang disampaikan petani ini menjadi pertimbangan pada proses penyusunan perencanaan kopi, misal ada kebutuhan alat pengeringan kopi (masuk dalam usulan pada saat musrenbangcam), kemudian usulan tadi masuk ke Dinas Pertanian sebagai OPD Teknis. Dinas Pertanian akan menilai kembali, apakah usulan ini bisa didanai dari Kabupaten, atau adakah program yang sama di Provinsi atau Pusat. Misal Program pengadaan alat pengeringan tadi, jadi bisa saja misalnya petani mendapatkan bantuan alat pengeringan dari pusat, dan JUTnya dari Pemda setempat. Pada pelaksanaan Musrenbangcam yang hadir merupakan perwakilan dari unsur ketua kelompok tetapi tidak semua ketua kelompok hadir, hanya beberapa orang yang hadir. Hal ini di karenakan adanya kekecewaan dari beberapa ketua kelompok yang ketika di wawancara mengatakan malas untuk hadir karena setiap ada usulan sangat jarang bisa terealisasi.

Penyusunan dokumen perencanaan pengembangan kawasan kopi berupa masterplan bersifat teknokratik. Dokumen perencanaan disusun oleh tim ahli dari IPB, dengan pendanaan dari Dinas pertanian Provinsi. Sementara untuk dokumen rencana aksi disusun oleh tim ahli dari akademisi Universitas Bengkulu (UNIB) dan tim dari Universitas Pat Petulai (UPP) dengan pendanaan dari Dinas Pertanian Kabupaten Kepahiang dan Dinas Pertanian Kabupaten Rejang Lebong. Dalam proses pengambilan data melibatkan petani sebagai sumber data/sumber

Pada penyusunan Rencana aksi di lakukan melalui proses FGD, Sosialisasi dan wawancara. Kelompok tani menghadirkan ketua dan anggota. Saran yang disampaikan oleh petani menjadi pertimbangan usulan pada proses perencanaan penyusunan perencanaan kopi. Tim Ahli meminta bantuan kepada Pemerintah Desa dan Penyuluh untuk menentukan perwakilan kelompok yang ikut hadir pada FGD. Petani mengharapkan adanya pengembangan kawasan kopi untuk meningkatkan

pendapatan untuk petani. Koordinasi dan komunikasi antar semua pihak yang terlibat pada Dokumen Perencanaan rencana aksi. Pada proses penyusunan perencanaan ini pihak ketiga datang ke Dinas Pertanian mencari data-data yang diperlukan dan sebagian data juga di ambil secara sampel kepada beberapa petani.

Kelembagaan yang dilibatkan pada proses perencanaan yaitu kelompok tani hal ini dikarenakan perencanaan yang akan disusun berkaitan dengan pengembangan kawasan kopi, yang menjadi sumber khususnya petani kopi, dan masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG) sebagai penyokong utama kegiatan petani petik merah

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara kepada informan juga di dapatkan hasil bahwa Program pengembangan kawasan kopi untuk Wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang merupakan Program yang di susun oleh Pemerintah Provinsi, dan pihak Pemerintah Kabupaten bersifat menjalankan dan mendukung Program tersebut”. Dari temuan yang didapatkan dari hasil wawancara ini diketahui bahwa ditingkatan pemerintah Kabupaten menunjukkan sikap sebagai pelaksana perintah atasan, sehingga kemudian dalam perjalanannya pemerintah Provinsi mulai beralih ”isu” dari Komoditi Kopi ke Komoditi Sawit karena suport pihak ketiga untuk komoditi sawit ini lebih banyak sehingga saat ini fokus pemerintah Provinsi beralih ke komoditi sawit. Sementara di tingkatan petani yang lebih bersifat menunggu karena ini adalah program pemerintah (yang akan dilakukan pemerintah dengan kegiatan pengembangan kopi) di wilayah mereka. Sehingga ketika program ini tidak mendapatkan suport pendanaan lagi kegiatan menjadi terhenti, bahkan untuk di wilayah Kecamatan Sindang Dataran petani yang telah menghibahkan lahan untuk kegiatan pengembangan kawasan kopi ini menjadi kecewa karena tidak ada tindak lanjut dari kegiatan.

Dari hasil wawancara dengan informan juga di dapatkan informasi bahwa kegiatan berjalan ketika ada support pendanaan. Kendala dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah terbatas, sehingga pemerintah daerah mencari support dana dari Provinsi dan Pusat yang menyebabkan ketergantungan dengan bentuk program yang ditawarkan pihak luar yang memiliki dana, Saat 2017 program fokus ke

pengembangan kawasan kopi, ketika habis program dan isu beralih ke produk lain, maka fokus juga beralih,

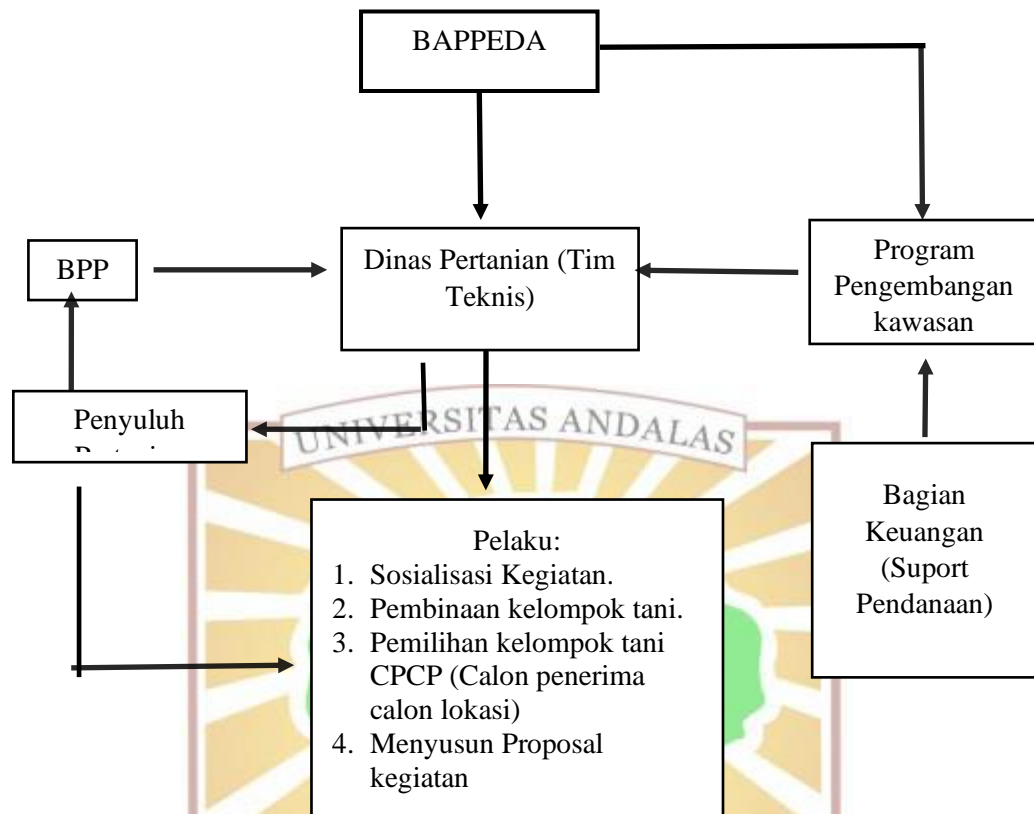
Temuan ini menunjukkan bahwa keputusan untuk menentukan program atau proyek pembangunan yang akan dilaksanakan disuatu wilayah, termasuk juga besarnya alokasi anggaran ditentukan sendiri oleh pihak pemerintah. Sifat parhernalistik dan asumsi bahwa anggaran negara dan daerah sebagai milik pemerintah dan bukan milik publik, mendorong secara sepihak mereka memutuskan mengenai apa yang akan mereka bangun, sementara aspirasi masyarakat dianggap belum begitu penting.

Hal ini menyebabkan ketika program dilaksanakan sepi dari partisipasi masyarakat, karena bisa saja program yang disusun tersebut tidak bersentuhan langsung dengan apa yang masyarakat butuhkan. Di sisi lain, masyarakat merasa tidak memiliki tanggungjawab untuk ikut menyukseskan program tersebut, karena mereka tidak ikut serta dalam proses penyusunan perencanaan.

Kegiatan pengembangan kawasan kopi dilaksanakan oleh sektor teremuka yaitu pada Dinas Pertanian, untuk dukungan kegiatan dari pusat berupa bantuan mesin-mesin peralatan pasca panen. Bentuk kebijakan yang dikeluarkan berupa SK Kawasan, hal ini merupakan bentuk suport yang diberikan Pemda. Pihak - pihak yang dilibatkan pada proses perencanaan pengembangan kawasan kopi menurut hasil wawancara dengan informan yaitu Bappeda sebagai mitra, Dinas Pertanian sebagai Tim Teknis. Kelompok tani sebagai pelaksana dan bagian keuangan untuk suport pendanaan.

Petani dilokasi kawasan pengembangan kawasan kopi dilibatkan dalam proses pelaksanaan mulai dari tahapan sosialisasi petik merah, pembinaan kelompok tani, pemilihan kelompok tani (CPCL/ Calon penerima calon lokasi) kemudian kelompok tani membuat proposal kegiatan dengan disertai RDKK (Rencana Defenitif kerja kelompok) yang di dampingi Penyuluh. Usulan ini disampaikan dari kelompok ke BPP, Kemudian ke Dinas Pertanian baru setelah itu kelompok petani mendapatkan bantuan. Sehingga dari temuan di lapangan didapatkan bahwa pada perjalanannya tidak semua kelompok tani mendapatkan bantuan untuk suport kegiatan pengembangan kawasan kopi ini, Hanya kelompok kelompok tani yan aktif dan "kenal" dengan petugas yang kemudian mendapatkan

bantuan. Para pihak yang terlibat pada pengembangan kawasan kopi di Tingkat Kabupaten terlihat pada gambar 13 berikut.



Gambar 6. Para pihak yang terlibat dalam pengembangan kawasan kopi di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang.

4.5 Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Pada Perencanaan Pengembangan Kawasan Kopi di Provinsi Bengkulu.

Dari hasil wawancara, observasi dan survei yang dilakukan terhadap responden sertav informan serta informan dalam penelitian ini, ternyata ada beberapa kegiatan yang dilakukan untuk pemberian kewenangan (*Authority*), meningkatkan kemampuan (*Capability*) dan membangun kepercayaan diri para petani (*Confident*). Pemberdayaan masyarakat atau pengembangan komunitas, sebenarnya tentang upaya meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki masyarakat terhadap program yang dijalankan. pemberdayaan adalah rangkaian aktivitas untuk memperkuat atau mengoptimalkan potensi kelompok sasaran, dalam hal ini petani kopi di Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong. Jadi, bisa disebut pemberdayaan

itu serangkaian langkah untuk memberdayakan atau menambah kekuatan kelompok petani agar mereka bisa keluar dari kemiskinan.. Temuan hasil penelitian rangkaian aktivitas yang dilakukan sebagai bentuk pemberdayaan meliputi:

1. Memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada petani dengan melibatkan mereka dalam proses perencanaan. Pemberdayaan melalui kelompok tani ini berarti memberikan kesempatan untuk bersuara (voice) dan kemampuan serta keberanian untuk memilih (choice) sesuai keinginan mereka. Hal ini sejalan dengan pendapat Mardikanto (2009) yang mengatakan bahwa pemberdayaan kelompok tani adalah proses terencana untuk meningkatkan nilai atau utilitas dari objek yang diberdayakan. Pemberdayaan juga berarti memberikan keterampilan dan informasi yang dibutuhkan anggota untuk mengambil keputusan dan bertindak tepat dalam mengatasi masalah sendiri. Bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat, seperti yang disebutkan Andayani, *et al* (2017) melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
2. Memberikan sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kepercayaan diri petani. Bentuk pemberdayaan lain yang dapat mendukung proses perencanaan pengembangan kawasan ini adalah melalui sosialisasi rencana pengembangan kawasan yang di dapat dilakukan secara berkelompok ataupun dilakukan secara cluster di tingkat Desa atau juga tingkat kecamatan. Sosialisasi ini bisa saja dilakukan melalui penyuluh pertanian sebagai perpanjangan tangan Dinas Pertanian, sehingga dengan adanya sosialisasi informasi mengenai rencana penyusunan perencanaan pengembangan kawasan pertanian kopi dapat tersampaikan kepada masyarakat.
3. Pemberian informasi secara luas, jelas dan detail.
Menyebarkan informasi secara luas, jelas, dan detail. Pemberdayaan masyarakat akan berjalan lancar jika elemen-elemennya berfungsi dengan baik, termasuk menyampaikan informasi yang luas, jelas, dan detail tentang rencana pengembangan kawasan kopi. Salah satu cara pemberdayaan dalam mengawali perencanaan ini adalah dengan memberikan kesempatan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pertemuan. Peluang ini bisa muncul setelah masyarakat mendapat informasi tentang rencana penyusunan dokumen perencanaan atau

rencana aksi pengembangan kawasan. Informasi ini bisa datang dari pihak pertama seperti OPD Teknis terkait, misalnya Dinas Pertanian, atau langsung melalui pertemuan rutin kelompok tani, atau dari penyuluh pertanian yang mendampingi kegiatan. Bahkan, informasi dapat disampaikan oleh ketua kelompok setelah mendapat info dari kegiatan di kabupaten melalui dinas terkait, asalkan ketua sadar pentingnya berbagi info dan mau melakukannya. Jika informasi tidak diterima dengan baik oleh anggota kelompok, ini bisa menjadi hambatan, sehingga masyarakat sulit terlibat aktif dalam penyusunan perencanaan karena kurangnya informasi. Meski sudah mendapatkan info dan kesempatan, jika masyarakat merasa tidak mendapat manfaat dari kegiatan, proses pemberdayaan bisa terhambat. Berdasarkan info dari informan, kegiatan pengumpulan kebutuhan masyarakat dilakukan oleh tim penyusun dokumen perencanaan dan rencana aksi melalui pertemuan yang melibatkan tokoh masyarakat dan ketua kelompok tani sebagai wakil. Namun sayangnya, kegiatan ini tidak selalu disampaikan secara luas kepada anggota kelompok tani dan masyarakat lain. Orientasi pemberdayaan bukan hanya hasil akhir, tapi proses yang menekan partisipasi rakyat, sehingga mereka sadar akan kemampuan sendiri dalam menyelesaikan suatu masalah. Tantangannya adalah bagaimana mengubah pola pikir masyarakat.

4. Focus Grup Diskusi. Penggalan kebutuhan petani kopi di lokasi pengembangan kawasan dilakukan melalui fokus grup diskusi (FGD). FGD ini dilakukan secara bertahap dan terintegrasi, terus menerus, dengan pendampingan dari pihak yang kompeten seperti penyuluh pertanian. Ini penting karena keberhasilan pembangunan pertanian berkelanjutan tidak hanya bergantung pada sumber daya, tetapi juga peran penyuluh (Faqih, 2014). Penyuluh pertanian mempunyai peran strategis dalam mendukung program pembangunan pertanian, memberdayakan petani, dan sebagai penghubung informasi dari pemerintah ke petani..

Rangkaian kegiatan bersama dengan petani kopi meliputi: diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*). Diskusi kelompok terarah ini digunakan untuk mengumpulkan data /informasi melalui wawancara pada proses perencanaan. Pada kegiatan *Focus group discussion* ini terjadi interaksi antar

individu (10-30) orang yang tidak saling mengenal yang dipandu oleh tim penyusun perencanaan diarahkan untuk mendiskusikan pemahaman dan atau pengalamannya tentang suatu program atau kegiatan yang diikuti atau dicermati, dan juga penggalian kebutuhan petani terhadap rencana pengembangan kawasan kopi di wilayah mereka.

5. Diskusi/curah pendapat. Kegiatan lainnya adalah metode pembelajaran dan praktik secara partisipatif (*Participatory Learning and action*). Pada metode ini kegiatan yang dilakukan melalui ceramah, curuh pendapat dan diskusi tentang topik perencanaan pengembangan kawasan kopi dan peningkatan ekonomi keluarga melalui usaha tani kopi. Pada metode pembelajaran menurut soleh (2014) ada beberapa prinsip yang perlu dipenuhi berupa : 1. Proses belajar dilakukan secara berkelompok oleh semua pemangku kepentingan secara interaktif dalam suatu proses analisis bersama. 2. *Multy Perspective*, yang mencerminkan beragam interpretasi pemecahan masalah riil yang dilakukan oleh para pihak yang beragam sudut pandangnya. 3. Spesifikasi lokasi, artinya sesuai dengan situasi dan kondisi para pihak/pemangku kepentingan. 4. Difasilitasi oleh para ahli yang bertindak sebagai katalisator dan fasilitator dalam proses pengambilan keputusan. 5. Pemimpin perubahan maksudnya keputusan yang telah diambil akan menjadi acuan bagi perubahan perubahan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat setempat.
6. Sekolah lapang. Kegiatan lainnya yang dilakukan sebagai bagian dari tindakan untuk pemberdayaan masyarakat berbentuk metode sekolah lapangan. Bentuk ini merupakan kegiatan pertemuan secara berkala yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat pada hamparan (tempat lapang) tertentu yang diawali dengan membahas masalah yang sedang dihadapi, kemudian diikuti dengan curah pendapat, berbagi pengalaman (*sharing*) tentang berbagai alternatif rencana pengembangan kawasan dan kegiatan kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya mencapai tujuan pengembangan Kawasan pertanian kopi yang paling efektif dan efisien dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki.
7. Pelatihan partisipatif. Pelatihan partisipatif dilakukan karena pemberdayaan dapat dilihat sebagai suatu proses Pendidikan non formal atau Pendidikan luar

sekolah . Kerangka acuan kegiatan dibuat berdasarkan pada kebutuhan petani kopi dan perkiraan kebutuhan petani kopi di masa yang akan datang. Pada pelatihan partisipatif ini menekankan akan pentingnya proses interaksi, diskusi dan berbagi pengalaman diantara sesama peserta ataupun diskusi penggalian pengalaman bersama instruktur. Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong kepercayaan diri petani untuk mampu menyampaikan pendapat.

Pemberdayaan atau *Empowerment* pada dasarnya menawarkan alternatif pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan dengan memberikan kesempatan/kepercayaan kepada petani untuk merencanakan dan kemudian melaksanakan program pembangunan yang mereka pilih dan putuskan sendiri. Setiap petani kopi pada dasarnya berada dalam proses pembelajaran. Pada proses ini mereka berusaha mencari tahu dari apa yang mereka tidak ketahui sebelumnya, sementara itu pemerintah dan para fasilitator berkewajiban untuk memberikan informasi sehingga petani menjadi tahu.

Terdapat perbedaan model pemberdayaan masyarakat dengan model pembangunan partisipatif. Pada model pembangunan partisipatif, masyarakat diberi kesempatan untuk ikut dalam proses memutuskan rencana dan pelaksanaan, tetapi penguasaan atas dana pembangunan tetap berada di tangan pemerintah. Sementara itu pada model pemberdayaan disamping masyarakat terlibat aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, mereka juga diberikan kewenangan untuk mengelola sejumlah dana untuk melaksanakan program tersebut (Soleh, 2014).

Dalam perjalanan perkembangan model pemberdayaan masyarakat kemudian menciptakan metodologi pengumpulan data yang dapat digunakan untuk merencanakan program pembangunan. Metodologi yang dimaksud dikenal dengan metodologi PAR (*Participation Action Research*); Seperti halnya dengan model *Community Development* (CD) maka PAR juga mengikutsertakan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dalam proses pengumpulan data, menjelaskan sebab sebab yang mereka anggap menjadi penyebab kemiskinan dan keterbelakangan dan juga merumuskan bagaimana cara menyelesaikan masalah.

Mekanisme kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat dirumuskan meliputi tahapan;

1. Penumbuhan hasrat atau keinginan untuk mau berubah; langkah awal dari pemberdayaan adalah bagaimana menumbuhkan keinginan untuk mau berubah pada diri petani. Proses menumbuhkan keinginan untuk berubah dilakukan dengan memberikan motivasi dan keyakinan bahwa apa yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik.
2. Menumbuhkan kemauan dan keberanian; Menumbuhkan kemauan dan keberanian dari diri petani untuk mau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan keberanian menerima tantangan dan hambatan yang bisa ditemui dalam setiap pilihan kegiatan yang dilakukan.
3. Mengembangkan kemauan dan ambil bagian (berpartisipasi); Penting mengembangkan kemauan dan ambil bagian atau berpartisipasi yang dimulai dengan secara sadar adanya keberanian untuk merubah nasib memperbaiki kehidupannya tanpa adanya paksaan dari pihak lain.
4. Peningkatan peran dalam setiap kegiatan; Keterlibatan petani secara sadar dalam setiap pertemuan kelompok tani, dan hadir dalam pertemuan-pertemuan penyusunan perencanaan, aktif pada kegiatan karena menyakini semua dilakukan untuk menuju kehidupan yang lebih baik.
5. Peningkatan kompetensi (kapasitas) diri secara otomatis; Petani yang mendapatkan manfaat dari keterlibatan dalam setiap kegiatan kemudian berupaya untuk meningkatkan kapasitas diri. Kesadaran peningkatan kompetensi (kapasitas) diri secara otomatis dilakukan petani karena sudah merasa mendapatkan manfaat.

Tahapan mekanisme pemberdayaan ini memerlukan metode dalam upaya pencapaiannya. Metode dilakukan sesuai dengan kondisi objektif petani kopi di wilayah pengembangan kawasan pertanian. Metode pemberdayaan ini berarti juga kerangka kerja yang berisi rangkaian kegiatan/Tindakan yang dilakukan dalam suatu kesatuan sistem pemberdayaan guna meningkatkan kewenangan, meningkatkan kapasitas (kemampuan), sehingga mampu menimbulkan kepercayaan diri petani dalam terlibat pada proses perencanaan pengembangan Kawasan pertanian kopi. Metode pemberdayaan ini menekankan pentingnya partisipasi petani, karena dengan partisipasi petani diharapkan mereka akan mampu mandiri.

1.6. Elemen Pemberdayaan Masyarakat Pada Perencanaan Pengembangan Kawasan Kopi di Provinsi Bengkulu.

Pemberdayaan masyarakat pada perencanaan pengembangan kawasan kopi pada penelitian ini ditinjau dari Element akses informasi, partisipasi, inklusi dan kapasitas kelembangaan lokal. Dari hasil pengalihan informasi dengan melihat persepsi petani kopi berdasarkan element element pemberdayaan pada kegiatan perencanaan pengembangan kawasan kopi di dapatkan hasil sebagai berikut;

Tabel 19. Element pemberdayaan masyarakat pada perencanaan pengembangan kawasan kopi.

No	Element Pemberdayaan	Kategori Persepsi Responden		
		Rendah (%)	Sedang (%)	Tinggi (%)
1.	Akses Informasi			
	Materi Informasi	33	43	24
	Media Informasi	19	69	12
	Kemudahan mendapatkan informasi	31	63	6
	Kredibilitas Sumber Informasi	2	55	43
2.	Partisipasi			
	Planning	0	34	66
	Organizing	55	31	19
	Actuating	57	25	18
	Controlling/ Monitoring dan Evaluasi	56	32	12
3.	Inklusif			
	Terbuka terhadap keberagaman	44	38	18
	Toleransi	29	60	11
	Kemudahan berinteraksi	5	61	34
4.	Kapasitas Kelembangaan lokal			
	Ketersedian lembaga lokal	18	50	32
	Ketersedian SDM yang memiliki pengetahuan tentang perencanaan	17	47	36
	Ketersedian SDM yang memiliki kemampuan	21	56	23

Sumber: Hasil Penelitian, 2023 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 19. Maka deskripsi variabel pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.6.1 Akses informasi.

Akses informasi pada penelitian ini terdiri dari empat element yaitu materi informasi, media informasi, kemudahan mendapatkan informasi dan kredibilitas informasi. Berdasarkan tabel 19 dapat dilihat bahwa sebesar 43% petani memperoleh materi informasi yang jelas. Informasi yang diterima berupa informasi teknis tentang bagaimana peningkatan hasil buah kopi dan cara pengendalian hama tanaman kopi, bagaimana cara menanam dan melakukan penyetekan serta pemupukan yang baik dan benar. Informasi mengenai penyambungan jenis kopi,

perawatan tanaman kopi yang menurut mereka penting bagi usaha tani kopi mereka. Informasi ini mereka dapatkan dari ketua kelompok baik di sampaikan secara langsung pada saat pertemuan bulanan kelompok tani, dengan didampingi oleh penyuluh pertanian ataupun tidak didampingi penyuluh pertanian. Sementara informasi tentang proses perencanaan pengembangan kawasan kopi mereka kurang jelas mengetahui.

”ada pernah dengar tapi tidak mendapatkan informasi dengan jelas apa itu perencanaan pengembangan kawasan kopi”

”ada pernah terdengar tapi tidak tahu apa perencanaan kawasan kopi itu”

Petani hanya mendengar bahwa di wilayah mereka akan dilakukan kegiatan pengembangan kawasan kopi. Materi informasi berupa hal-hal teknis terkait budidaya kopi dan usaha kopi mereka dapatkan dari ketua kelompok baik di sampaikan secara langsung pada saat pertemuan bulanan kelompok tani, dengan didampingi oleh penyuluh pertanian ataupun tidak didampingi penyuluh pertanian. Hal ini mengindikasikan bahwa materi informasi tersedia tetapi kualitas materi informasi belum berkaitan dengan perencanaan pengembangan kawasan kopi dan belum memenuhi kebutuhan petani terkait perencanaan pengembangan kawasan kopi. Materi informasi yang mereka terima belum secara jelas berkaitan dengan perencanaan pengembangan kawasan kopi melainkan tentang hal teknis budidaya kopi.

Menurut petani kopi materi informasi yang mereka terima sesuai dengan kebutuhan mereka mengenai usaha tani kopi yang mereka lakukan, informasi juga mereka dapatkan pada saat kumpul pertemuan kelompok. Informasi mengenai harga penjualan kopi yang kadang naik kadang turun, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa mereka tidak begitu memahami apa perencanaan pengembangan kawasan kopi itu. Ada juga yang menyampaikan bahwa informasi yang mereka ketahui berkaitan dengan cara pemupukan, penyemprotan, penggilingan dan pasca panen. Perawatan kopi sampai pengolahan kopi dan cara membedakan kelas - kelas kopi.

Berdasarkan tabel 19 juga terlihat media informasi 69% kategori sedang yang artinya media informasi cukup bisa diakses oleh petani, media informasi yang paling sering digunakan yaitu penyampaian pesan yang langsung dari ketua

kelompok pada pertemuan kelompok, pesan juga mereka terima melalui media HP menggunakan aplikasi whatsapp. Penggunaan media informasi melalui pesan pada aplikasi whatsapp ini menurut petani memudahkan mereka menerima informasi yang disampaikan baik dari ketua kelompok, penyuluh pertanian ataupun dari Dinas Pertanian Kabupaten.

Dengan media informasi yang mudah diakses ini mendukung petani mudah menerima informasi. Ini terlihat dari hasil analisis pada tabel 19, kemudahan informasi 63% masuk kategori sedang, yang artinya dengan adanya media informasi yang tepat petani memperoleh kemudahan dalam menerima informasi. Semetara itu untuk kredibilitas informasi 55% masuk kategori sedang dan 43% kredibilitas tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa petani percaya dengan informasi yang mereka terima karena yang menyampaikan informasi adalah ketua kelompok yang mereka percaya. Informasi juga mereka dapatkan dari penyuluh pertanian dan Dinas Pertanian sebagai pembina. Kepercayaan akan melahirkan suasana saling membutuhkan, saling ketergantungan antara ketua kelompok dan anggota, dan antara pemerintah dalam hal ini melalui Dinas Pertanian dengan petani sehingga keduanya berada pada posisi yang sejajar, sebagaimana disampaikan Mabon, *et al* (2019), kebijakan perencanaan dipengaruhi kepercayaan. Dengan kepercayaan mewujudkan perubahan untuk kesejahteraan.

1.6.2. Partisipasi.

Tahapan perencanaan pengembangan kawasan kopi dimulai dari planning, organizing, actuating dan controlling. Pada element partisipasi, ketika petani kopi mendapatkan informasi maka mereka cenderung 66% akan berpartisipasi dalam kegiatan atau mau datang terlibat pada proses jika di ajak dan diberitahu, sejauh ini informasi proses perencanaan untuk pengorganisasian dan pengarahan tidak mereka dapatkan dengan jelas. 50% berpendapat bahwa *organizing* (Pengorganisasian) rendah dan *actuating* (pengarahan) 57% rendah. Kegiatan yang ada adalah pada tahap pelaksanaan program, dimana mereka adalah sebagai penerima program. Demikian juga pada tahap evaluasi controlling terhadap perencanaan 56% masuk kategori rendah dan mengatakan bahwa petani kopi tidak terlibat sama sekali pada tahapan ini.

Partisipasi secara umum bermakna sebagai keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Keterlibatan biasanya didorong oleh suatu kesadaran dan kesukarelaan untuk ikut memperbaiki keadaan. Demikian halnya dengan petani kopi di lokasi perencanaan pengembangan kawasan. Kesadaran untuk memperbaiki kondisi kehidupan agar dapat lebih baik, baik untuk dalam kegiatan budidaya kopi, pengolahan dan pemasaran kopi membuat mereka mau datang berpartisipasi pada pertemuan pertemuan perencanaan pengembangan kawasan kopi jika mereka mendapatkan informasi atau kesempatan untuk terlibat. Pada pelaksanaan kegiatan pembangunan, partisipasi petani kopi merupakan manifestasi dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab terhadap upaya memperbaiki kualitas hidup.

Pada pemberdayaan terdapat bentuk partisipasi yang paling intens berupa *shared control* (berbagi kewenangan). Melalui partisipasi petani belajar bersama sama untuk mencari solusi dari pemecahan masalah. Partisipasi pada pemberdayaan juga merupakan pembelajaran yang berkesinambungan dalam rangka mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat.

Dalam upaya penguatan partisipasi masyarakat dibutuhkan syarat yang berbasis pada kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah berupa pemberian kesempatan untuk secara aktif ambil bagian dalam setiap tahapan pembangunan. Ada beberapa tipe partisipasi masyarakat menurut Soleh (2014) yaitu:

1. Partisipasi pasif/ manipulatif, dengan karakteristik; masyarakat diberitahu apa yang sedang dan telah terjadi. Pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat, dan informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional diluar kelompok sasaran.
2. Partisipasi informatif, dengan karakteristik; masyarakat menjawab pertanyaan pertanyaan penelitian. Masyarakat tidak diberi kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penelitian, dan akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.

3. Partisipasi konsulatif dimana memiliki karakteristik berupa; masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi. Orang luar mendengarkan, menganalisa masalah dan pemecahannya. Tidak ada peluang untuk membuat keputusan bersama. Para Profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan., dan Masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti.
4. Partisipasi insentif dengan karakteristik; masyarakat memberikan pengorbanan/jasarnya untuk memperoleh imbalan/insentif. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran dan eksperimen eksperimen yang dilakukan., dan masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan kegiatan setelah insentif dihentikan.
5. Partisipasi Fungsional dengan karakteristik; masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek. Pembentukan kelompok biasanya setelah ada keputusan keputusan utama yang disepakati., dan pada tahap awal, masyarakat tergantung kepada pihak luar, tetapi secara bertahap menunjukkan kemandiriannya.
6. Partisipasi interaktif dengan karakteristik; masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan. Cenderung memperlihatkan metode interdisipliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistimatis., dan masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas pelaksanaan keputusan keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan.
7. *Self mobilization* (mandiri) memiliki karakteristik; masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi pihak luar) untuk mengubah sistim atau nilai nilai yang mereka miliki. Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga lembaga lain untuk mendapatkan bantuan teknis dan sumberdaya yang diperlukan., dan masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada dan atau digunakan.

Penguatan partisipasi kepada petani diarahkan pada tipe partisipasi yang ketujuh dimana partisipasi masyarakat berupa *self mobilization* (mandiri). Pada tipe ini diyakini telah ada pemberdayaan pada petani kopi. Tetapi dari hasil temuan penelitian, partisipasi petani ada jika mereka diberikan informasi rencana pertemuan atau kegiatan oleh ketua kelompok atau penyuluh pertanian, baru

kemudian mereka hadir pada kegiatan. Jika tidak mendapatkan informasi petani kopi tidak akan hadir pada pertemuan apalagi untuk terlibat pada proses perencanaan. Partisipasi yang terjadi baru pada tipe partisipasi pasif/ *manipulatif*, tipe no 1 ini menunjukkan bahwa belum adanya pemberdayaan petani pada proses perencanaan pengembangan kawasan kopi.

1.6.3. Inklusif.

Kesempatan untuk perencanaan ini tidak semua petani kopi terlibat, biasanya hanya pengurus kelompok, ketua dan sekretaris, dan ini pun tidak semua kelompok petani di libatkan, terlihat dari hasil penelitian 44% menyatakan terbuka terhadap keberagaman (kebhinekaan) rendah yang artinya tidak semua kelompok petani kopi dilibatkan, tetapi mereka mengakui bahwa pada saat pertemuan pertemuan biasanya toleransi berupa menghargai pendapat orang lain pada diskusi diskusi kelompok telah ada terlihat bahwa 60% berpendapat toleransi masuk dalam kategori sedang yang artinya telah ada. Begitupun dengan kemudahan berinteraksi, disampaikan jika mereka dilibatkan mereka cenderung mudah berinteraksi atau memiliki kemampuan interaksi yang cukup sedang dan cenderung tinggi dengan nilai 61% dan 34 %.

1.6.4. Kapasitas Kelembagaan Lokal.

Kapasitas kelembagaan lokal dipahami bahwa lembaga lokal yang ada di wilayah pengembangan kawasan memiliki kemampuan untuk melakukan dan mengikuti proses perencanaan pengembangan kawasan. Pada hasil penelitian ditemukan untuk kapasitas kelembagaan lokal, 50% mengatakan adanya kelembagaan lokal di masyarakat berupa kelompok tani yang diakui memiliki pengetahuan dengan persentase 47% sedang dan cenderung tinggi 36%. Serta 56% ketersediaan SDM yang memiliki kemampuan. Potensi ini menunjukkan bahwa dari sisi kemampuan dan keberdayaan masyarakat telah ada dan semestinya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dengan melibatkan mereka secara aktif pada proses perencanaan pengembangan kawasan kopi.

Berdasarkan hasil penelitian dari sisi partisipasi masyarakat keterlibatan langsung dalam pertemuan pertemuan yang membahas perencanaan pengembangan kawasan kopi belum ada. Informasi dari hasil wawancara diketahui bahwa pertemuan pertemuan yang membahas perencanaan pengembangan

kawasan kopi belum ada. Informasi dari hasil wawancara diketahui bahwa pertemuan kelompok dilakukan secara rutin setiap bulannya, baik itu bersama penyuluh pertanian ataupun pertemuan yang hanya dihadiri oleh internal anggota kelompok, dan sesekali mendapatkan kunjungan dari Dinas Pertanian.

Diskusi- diskusi yang dilakukan pada pertemuan kelompok yang mereka lakukan berupa informasi mengenai harga jual kopi, sosialisasi akan dilakukan kegiatan atau adanya bantuan dari Dinas Pertanian, dimana kemudian kelompok diminta untuk menyusun rencana kerja kelompok. Pertemuan pertemuan ini juga membahas mengenai cara perawatan kebun yang baik agar dapat menghasilkan kopi yang banyak berbuah lebat dan harga yang bagus. Cara pemupukan dan pemberian obat yang baik untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman kopi. Ada juga informasi mengenai bahwa lokasi perkebunan mereka akan dijadikan pusat kopi dan sentral pelatihan anak anak mahasiswa. Selain itu menurut mereka penting adanya informasi mengenai pemasaran kopi. Secara umum mereka biasanya hadir pada pertemuan pertemuan kelompok karena setiap akan pertemuan kelompok dikabarin oleh ketua kelompok (mendapatkan informasi mengenai rencana pertemuan kelompok). Tetapi kadang kadang mereka tidak hadir jika sedang sibuk. Kesadaran untuk hadir pada pertemuan pertemuan kelompok ini ada karena menurut mereka penting agar mendapatkan informasi yang berkaitan dengan usahatani kopi yang mereka lakukan. Tetapi untuk pertemuan pertemuan diluar kelompok yaitu hadir di pertemuan tingkat Kecamatan atau Kabupaten biasanya hanya ketua kelompok yang di undang untuk hadir, kecuali ketua berhalangan hadir kemudian diwakilkan oleh salah satu anggota kelompok. Secara umum informasi mengenai perencanaan pengembangan kawasan kopi tidak mereka ketahui kecuali beberapa orang ketua kelompok yang diundang pada pertemuan ditingkat kabupaten pada pelaksanaan Fokus Grup Diskusi yang dilakukan oleh konsultan perencana pada tahap awal penyusunan perencanaan, sehingga dengan dasar ini mereka tidak mengetahui dan tidak memahami tujuan dari proses perencanaan pengembangan kawasan kopi. "belum ada penjelasan mengenai hal ini", atau "tidak paham karena belum ada informasi dan penjelasan mengenai hal ini" atau "belum paham karena saya tidak hadir".

Pertemuan pertemuan kelompok yang mereka lakukan pada setiap bulannya menurut mereka memberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, tidak ada perbedaan apakah mereka masuk dalam kategori mampu, kurang mampu. Sementara itu ada juga yang menyampaikan tidak mengetahui karena tidak ikut pertemuan kelompok atau sedang tidak bisa hadir pada pertemuan kelompok. Berkaitan dengan proses perencanaan pengembangan kawasan kopi mereka tidak mengetahui, kurang paham karena belum ada informasi.

Kelembagaan lokal yang ada berupa kelompok kelompok tani. Melalui kelompok kelompok tani ini informasi mengenai pengembangan kawasan kopi disampaikan oleh Dinas pertanian baik secara langsung atau melalui penyuluh pertanian. Terdapat kelompok karang taruna, kelompok pengajian, kelompok remaja dan PKK di Desa tetapi tidak dilibatkan dalam kegiatan pengembangan kawasan kopi. Berdasarkan diskusi dan hasil wawancara kebutuhan untuk pengembangan kawasan kopi berupa penyuluhan, modal, bimbingan pemasaran, informasi mengenai pemasaran kopi, Bibit unggul, bantuan pupuk, dan rumah jemur, lahan penjemuran (*solar drayer*), Cara budidaya, perawatan, teknik pengolahan lahan dan pasca panen, serta sarana dan prasarana yang menunjang. Informasi mengenai pupuk dan subsidi pupuk dan jika ada bantuan seperti pupuk subsidi dan lain lainnya. Kebutuhan lainnya berupa pelatihan untuk pengembangan SDM petani, Alat pengolahan lahan, Bimbingan serta kestabilan harga dan adanya pertemuan belajar terkait pertanian kopi. Menurut Ariaoktafiani, (2024) Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan merupakan langkah dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

1.7. Faktor - Faktor Pendorong Pemberdayaan pada Perencanaan Pengembangan Kawasan

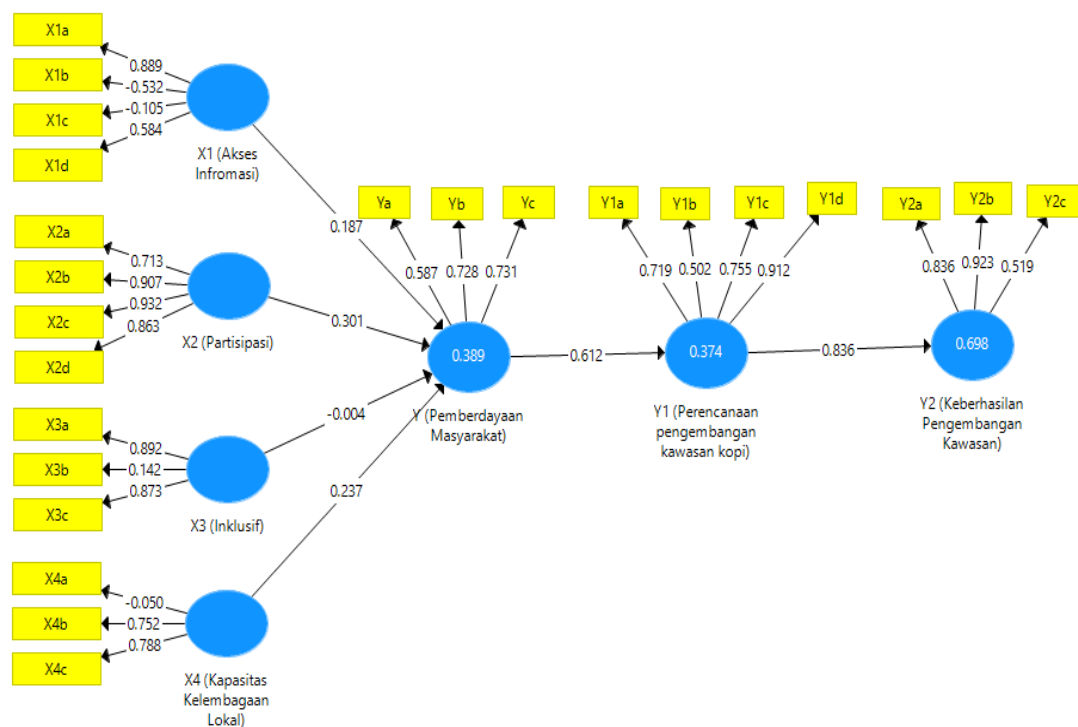
Tujuan kedua dari penelitian ini adalah menganalisa faktor pendorong efektivitas pemberdayaan dan bagaimana faktor pendorong ini meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan Kawasan kopi. Maka digunakan analisis data dengan pendekatan metode *Structural Equation Model* (SEM) yang dioperasikan melalui program *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan software SmartPLS. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

2.7.1. Pengujian Instrumen Penelitian (Evaluasi Outer Model).

a. Uji Validitas.

Uji validitas ini untuk memeriksa seberapa akurat item-item pertanyaan di kuesioner itu mewakili variabel yang diukur. Pengujian validitas menggunakan *loading factor* dari PLS, yang didapat seluruh item pertanyaan memenuhi nilai yang disarankan, sehingga indikator yang dipakai untuk mengukur variabel dalam penelitian ini adalah valid. Nilai *loading factor* dari hasil olah *smart-PLS* bisa dilihat pada Tabel 15. Nilai *Outer Model* dilakukan dengan melihat nilai *Convergent Validity*, hal ini diukur berdasarkan nilai korelasi dengan variabel yang diukur dengan nilai *loading factor* $> 0,70$ sangat direkomendasikan namun nilai $> 0,50 - 0,60$ masih bisa ditolerir sepanjang model masih dalam pengembangan (Ghozali, 2006). Dalam analisis ini validitas data diukur dengan nilai > 0.50 .

Berdasarkan Gambar Model Tahap Awal, kemudian dilakukan running tahap pertama (PLS_Algorithm), dan dihasilkan output model sebagai berikut: dengan nilai loading faktor (lf) pada output *Outer Loadings*:



Gambar 7. Diagram jalur dengan nilai *Loading Factor* sebelum dieliminasi.

Hasil pengukuran *loading factor* model disajikan pada tabel 20.

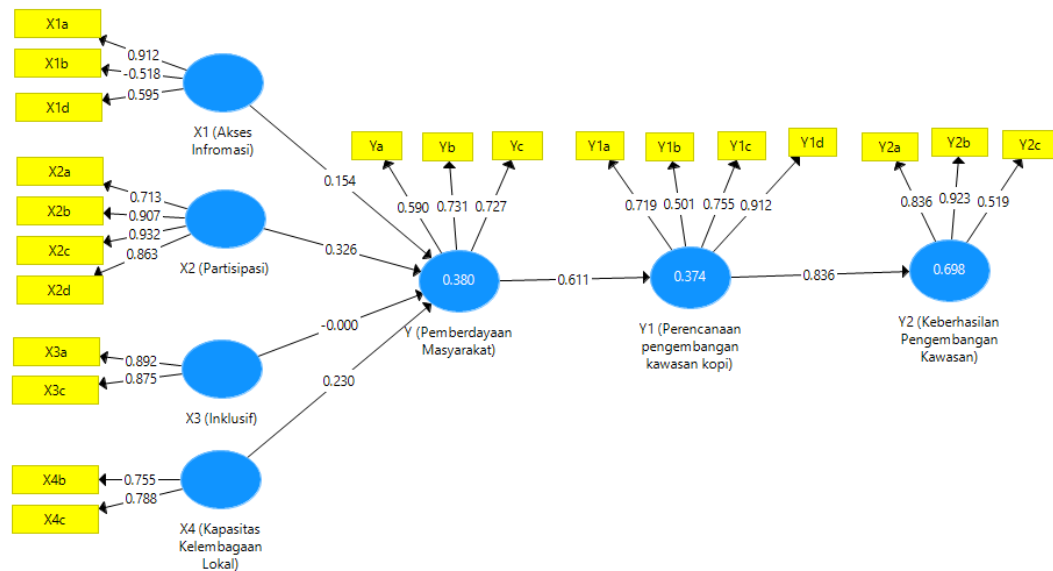
Tabel 20. Tabel Hasil uji *Validitas Loading Factor* Iletasi-1 (*Outer Loadings*).

No	Variabel	<i>Loading Factor</i>	Keterangan
1.	Akses Informasi (X1)		
	Materi Informasi (X1a)	0,889	Valid
	Media Informasi (X1b)	-0,532	Valid
	Kemudahan mendapatkan informasi (X1c)	-0,105	Tidak Valid
	Kredibilitas Informasi (X1d)	0,584	Valid
2.	Partisipatif (X2)		
	Planning :Perencanaan (X2a)	0,713	Valid
	Organizing: Pengorganisasian (X2b)	0,907	Valid
	Actuating : Pelaksanaan (X2c)	0,932	Valid
	Controlling : Monitoring dan Evaluasi (X2d)	0,863	Valid
3.	Inklusif (X3)		
	Terbuka terhadap keberagaman (X3a)	0,892	Valid
	Toleransi (X3b)	0,142	Tidak Valid
	Kemudahan berinteraksi (X3c)	0,873	Valid
4.	Kapasitas Kelembagaan Lokal (X4)		
	Ketersediaan Lembaga lokal sebagai wadah membuat perencanaan (X4a)	-0,050	Tidak Valid
	Ketersedian sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan tentang perencanaan (X4b)	0,752	Valid
	Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam perencanaan (X4c)	0,788	Valid
5.	Pemberdayaan (Y)		
	Ada Kesempatan (Ya)	0,587	Valid
	Ada Kemauan (Yb)	0,728	Valid
	Ada Kemampuan (Yc)	0,731	Valid
6.	Perencanaan Pengembangan Kawasan kopi (Y1)		
	Tahap persiapan (Y1a)	0,719	Valid
	Tahap penyusunan rencana (Y1b)	0,502	Valid
	Tahap pelaksanaan (Y1c)	0,755	Valid
	Tahap Evaluasi (Y1d)	0,912	Valid
7.	Keberhasilan Pengembangan Kawasan (Y2)		
	Daya Saing (Y2a)	0,836	Valid
	Posisi tawar petani pada penentuan harga (Y2b)	0,923	Valid
	Lahan yang berkelanjutan tidak terancam alih fungsi lahan (Y2c)	0,519	Valid

Sumber: Hasil Penelitian, 2023 (Data Diolah)

Indikator yang mempunyai nilai loading faktor yang besar menunjukkan bahwa indikator tersebut mempunyai hubungan yang kuat dengan variabel laten,

sehingga mendukung tingginya reliabilitas. Selanjutnya, berdasarkan tabel 20 di atas, dilakukan *drop* (buang) pada indikator-indikator yang mempunyai nilai $lf < 0,5$ (X1c, X3b, dan X4a). Sehingga didapatkan nilai loading faktor pada output *Outer Loadings* running Model Tahap_2 (kedua) berikut:



Gambar 8. Diagram jalur dengan nilai *Loading Factor* setelah dieliminasi.

Hasil pengukuran *loading factor* model disajikan pada tabel 21.

Tabel 21. Tabel Hasil uji *Validitas Loading Factor Iterasi_1* (Outer Loadings).

No	Variabel	Loading factor	Keterangan
1.	Akses Informasi (X1)		
	Materi Informasi (X1a)	0,912	Valid
	Media Informasi (X1b)	-0,518	Valid
	Kredibilitas Informasi (X1d)	0,595	Valid
2.	Partisipatif (X2)		
	Planning :Perencanaan (X2a)	0,713	Valid
	Organizing: Pengorganisasian (X2b)	0,907	Valid
	Actuating : Pelaksanaan (X2c)	0,932	Valid
	Controlling : Monitoring dan Evaluasi (X2d)	0,863	Valid
3.	Inklusif (X3)		
	Terbuka terhadap keberagaman (X3a)	0,892	Valid
	Kemudahan berinteraksi (X3c)	0,875	Valid
4.	Kapasitas Kelembagaan Lokal (X4)		
	Ketersedian sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan tentang perencanaan (X4b)	0,755	Valid

	Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam perencanaan (X4c)	0,788	Valid
5	Pemberdayaan (Y)		
	Ada Kesempatan (Ya)	0,590	Valid
	Ada Kemauan (Yb)	0,731	Valid
	Ada Kemampuan (Yc)	0,727	Valid
6.	Perencanaan pengembangan kawasan kopi partifipatf (Y1)		
	Tahap persiapan (Y1a)	0,719	Valid
	Tahap penyusunan rencana (Y1b)	0,501	Valid
	Tahap pelaksanaan (Y1c)	0,755	Valid
	Tahap Evaluasi (Y1d)	0,912	Valid
7.	Keberhasilan Pengembangan Kawasan (Y2)		
	Daya Saing (Y2a)	0,832	Valid
	Posisi tawar petani pada penentuan harga (Y2b)	0,918	Valid
	Lahan yang berkelanjutan tidak terancam alih fungsi lahan (Y2c)	0,519	Valid

Sumber: Hasil Penelitian, 2023 (Data Diolah)

Pada tabel 21 hasil running tahap_2 pada output Outer Loadings sudah tidak ditemukan nilai yang di bawah $< 0,5$. Sehingga pada tahap ini Model Tahap_2 dikatakan model yang sudah baik/fit. Sehingga bisa dilanjutkan pada analisis berikutnya.

Karena semua indikator memiliki nilai outhet loadings yang lebih tinggi dari 0,5 disimpulkan bahwa semua indikator tersebut adalah valid. Maka, semua indikator dapat menjelaskan tiap variabel yang ada dan variabel dapat dikatakan valid untuk analisis selanjutnya. Pada variabel akses informasi diketahui X1.a mempunyai nilai outer loadings terbesar yaitu 0,910 pada indikator materi informasi yang sesuai dengan kebutuhan petani. Hal ini menunjukkan indikator materi informasi yang sesuai sangat terkait dengan untuk menjelaskan variabel akses informasi. Bagi petani materi informasi berarti petani penting untuk menerima informasi mengenai tahapan perencanaan pengembangan Kawasan kopi dan petani menerima informasi mengenai rencana pengembangan Kawasan kopi

b. Uji Reliabilitas.

Uji reliabilitas data (uji keandalan) dilakukan untuk mengukur konsistensi dan stabilitas dari skor (skala pengukuran) sebuah instrumen dalam mengukur konsep tertentu dan membantu nilai *goodness* dari sebuah instrumen pengukuran.

Uji kualitas data dilakukan dengan melihat nilai *composite reliability* yang dihasilkan dengan perhitungan PLS dari variabel penelitian. Untuk menentukan *composite reliability*, apabila nilai *composite reliability* $\rho_c > 0,8$ dapat dikatakan bahwa konstruk memiliki reliabilitas yang tinggi atau reliable dan $\rho_c > 0,6$ dikatakan cukup *reliable* (Ghozali, 2011) dan *Average Variance Extracted* (AVE) > 0.50 . nilai *cronbach alpha* bernilai di atas 0,70 (Ghozali.2015). Hasil pengujian reliabilitas untuk semua variabel yang diteliti disajikan dalam tabel 20 berikut:

Tabel 22. Uji Reliabilitas faktor faktor pendorong pemberdayaan pada pengembangan kawasan.

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Akses Informasi (X1)	0,481	0,768	0,633
Perencanaan pengembangan Kawasan Kopi (Y1)	0,713	0,820	0,543
Inklusif (X3)	0,718	0,876	0,780
Kapasitas Kelembagaan Lokal (X4)	0,321	0,746	0,596
Keberhasilan Pengembangan Kawasan (Y2)	0,687	0,815	0,606
Partisipatif (X2)	0,878	0,917	0,736
Pemberdayaan (Y)	0,442	0,725	0,470

Sumber: Hasil Penelitian, 2023 (Data Diolah)

Dari hasil uji reliabilitas di atas menunjukkan:

1. Variabel Akses Informasi memiliki nilai Cronbach Alpha (0.481), Composite Reliability (0.768) dan AVE (0.633)
2. Variabel Perencanaan pengembangan Kawasan memiliki nilai Cronbach Alpha (0.713), Composite Reliability (0.820) dan AVE (0.543)
3. Variabel Inklusif memiliki nilai Cronbach Alpha (0.718), Composite Reliability (0.876) dan AVE (0.780)
4. Variabel Kapasitas Kelembagaan Lokal memiliki nilai Cronbach Alpha (0.321), Composite Reliability (0.746) dan AVE (0.596)
5. Variabel Keberhasilan Pengembangan Kawasan memiliki nilai Cronbach Alpha (0,687), Composite Reliability (0,815) dan AVE (0,606).
6. Variabel Partisipatif memiliki nilai Cronbach Alpha (0.878), Composite Reliability (0.917) dan AVE (0.736)
7. Variabel Pemberdayaan Masyarakat memiliki nilai Cronbach Alpha (0.442), Composite Reliability (0.725) dan AVE (0.470).

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas di atas dapat dikatakan semua variabel sebagai pengukur yang *fit*, dimana nilai dari Alpha Cronbach, Composite Reliability dan Average Variance Extracted sudah memenuhi nilai yang dipersyaratkan. Tidak semua dari kriteria dalam uji reliabilitas harus terpenuhi. Asalkan dari tiga kriteria (Alpha Cronbach, Composite Reliability dan AVE) tersebut salah satu terpenuhi.

2.7.2. Pengujian Nilai Inner Model dan Structural Model

Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel, nilai signifikansi dan *R-square* dari model penelitian. Model *structural* dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk variabel dependen.

Tabel 23. R Square dan RSquare Adjusted model perencanaan pengembangan kawasan kopi berbasis pemberdayaan

Variabel	R Square	R Square Adjusted
Y (Pemberdayaan Masyarakat)	0,380	0,373
Y1 (Perencanaan Pengembangan kawasan kopi partisipatif)	0,378	0,372
Y2 (Keberhasilan pengembangan kawasan)	0,698	0,697

Sumber: Hasil Penelitian, 2023 (Data Diolah)

Tabel 23. di atas menunjukkan nilai *R-square* variabel Perencanaan pengembangan kawasan kopi partisipatif (Y1) sebesar 0.378 artinya variabilitas Perencanaan pengembangan kawasan kopi partisipatif yang dapat dijelaskan oleh Pemberdayaan Masyarakat (Y) sebesar 37,8%. Variabel Keberhasilan pengembangan kawasan (Y2) mempunyai nilai *R-square* sebesar 0.698 artinya variabilitas keberhasilan pengembangan kawasan yang dapat dijelaskan oleh variabel Perencanaan pengembangan kawasan kopi sebesar 69,8 %. Sedangkan untuk variabel Pemberdayaan Masyarakat (Y) mempunyai nilai *R-square* sebesar 0,380 artinya variabilitas Pemberdayaan Masyarakat yang dapat dijelaskan oleh variabel Akses Informasi, Partisipatif, Inklusif, dan Kapasitas Kelembagaan Lokal sebesar 38 %. Semakin tinggi nilai *R-square*, maka semakin besar kemampuan

variabel independen tersebut dapat menjelaskan variabel dependen sehingga semakin baik persamaan struktural.

2.7.3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis didasarkan pada nilai yang terdapat pada *analisis structural model*, tingkat signifikansi *path coefficient* didapat dari nilai-t dan nilai *standardized path coefficient*. Batas nilai pengujian hipotesis yaitu Nilai-t muatan faktornya (*factor loadings*) lebih besar dari nilai kritis (≥ 1.96). Hasil koefisien jalur dan nilai t-statistik yang didapatkan melalui proses bootstrapping di sajikan pada table 24 berikut:

Tabel 24. Nilai Koefisien jalur model perencanaan pengembangan kawasan berbasis pemberdayaan masyarakat.

No.	Path Coefficients	Original Sample	T Statistics	P Values	Keterangan
1.	Akses Informasi (X1) → Pemberdayaan Masyarakat (Y)	0.187	3.441	0.001	Berperan positif signifikan dengan nilai t-hitung 3,441 > 1.96 atau dengan p-value sebesar 0.0001 < 0.05. Besarnya pengaruh adalah 0.187 (18,7%).
2.	Partisipasi (X2) → Pemberdayaan Masyarakat (Y)	0.319	4,475	0.000	Berperan positif signifikan dengan, nilai t-hitung sebesar 4,475 > 1.96 atau dengan p-value sebesar 0.000 < 0.05. Besarnya pengaruh adalah 0.319 (31,9%).
3.	Inklusif (X3) → Pemberdayaan Masyarakat (Y)	-0.012	0,191	0.849	Tidak berperan positif signifikan dengan, nilai t-hitung 0,191 < 1.96 atau dengan p-value sebesar 0.849 > 0.05. Besarnya pengaruh adalah -0,012 (-1,2%).
4.	Kapasitas Kelembagaan Lokal (X4) → Pemberdayaan Masyarakat (Y)	0.228	3.667	0.000	Berperan positif signifikan dengan nilai t-hitung 3.667 > 1.96 atau dengan p-value sebesar 0.000 < 0.05. Besarnya pengaruh adalah 0.228 (22,8%).
5.	Pemberdayaan Masyarakat (Y) → Perencanaan pengembangan kawasan kopi partisipatif (Y1)	0.611	19,069	0.000	Berperan positif signifikan dengan nilai t-hitung 19,069 > 1.96 atau dengan p-value sebesar 0.000 < 0.05. Besarnya pengaruh adalah 0.611 (61,1%)
6.	Perencanaan pengembangan kawasan kopi partisipatif (Y1) → Keberhasilan Pengembangan Kawasan (Y2)	0.836	69,078	0.000	Berperan positif signifikan dengan nilai t-hitung 69,078 > 1.96 atau dengan p-value sebesar 0.000 < 0.05. Besarnya pengaruh adalah 0,836 (83,6%)

Sumber: Hasil Penelitian, 2023 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 24 Path Coefficients di atas dapat dibuatkan kesimpulan sementara hasil analisis data, sebagai berikut:

1. Pengaruh akses informasi (X1) terhadap pemberdayaan masyarakat (Y).

Akses Informasi berperan positif 18,7% terhadap pemberdayaan masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa informasi yang diterima oleh masyarakat dalam hal ini petani, baik didapatkan dari ketua kelompok, teman ataupun penyuluh pertanian penting untuk bisa sampai ke petani, sehingga petani/masyarakat dengan informasi yang diterima bisa memahami dan termotivasi untuk ikut serta pada perencanaan pengembangan kawasan yang dilakukan dan berkesadaran penting bahwa perencanaan pengembangan kawasan kopi ini penting dan menjadi kebutuhan mereka. Kesadaran ini ada ketika petani memahami tujuan dari kegiatan berdasarkan informasi yang mereka terima dari ketua kelompok atau dari perwakilan masyarakat lainnya yang hadir pada saat sosialisasi dan FGD penyusunan dokumen perencanaan dan rencana aksi pengembangan kawasan. Kondisi yang ditemukan kemudian bahwa berdasarkan hasil wawancara kepada responden diketahui bahwa mereka mengetahui informasi mengenai rencana pengembangan kawasan kopi ini dari ketua kelompok, dari anggota masyarakat atau teman, tetapi seperti apa dan bagaimana tujuan dari kegiatan ini mereka tidak begitu memahami. Informasi yang jelas dan mampu memahamkan mereka menjadi penting dilakukan oleh ketua kelompok, Pemerintah Desa, penyuluh pertanian ataupun perwakilan anggota kelompok lainnya yang hadir langsung pada saat sosialisasi dan FGD penyusunan *master plan* dan *action plan* agar keberdayaan yang ditandai dengan secara sadar paham terhadap pilihan pilihan yang dilakukan dapat ada pada masyarakat secara umum dalam hal ini petani di lokasi kawasan pengembangan kopi. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik akses informasi masyarakat terhadap perencanaan pengembangan kawasan pertanian semakin meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengambilan keputusan, kemandirian dan memperkuat posisi tawar petani dalam perencanaan pengembangan kawasan. Secara teoritis, hasil ini sejalan dengan konsep *information empowerment*, dimana informasi dipandang sebagai sumberdaya

strategis yang memperkuat kemampuan individu dan kelompok dalam berpartisipasi aktif dalam pembangunan (Chambers, 1997; Alsop et al, 2006)

2. Pengaruh partisipasi (X2) terhadap pemberdayaan masyarakat (Y).

Partisipasi masyarakat berperan positif signifikan dengan, nilai t-hitung sebesar $4,475 > 1.96$ atau dengan p-value sebesar $0.000 < 0.05$. Besarnya pengaruh adalah 0.319 (31,9%) menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat maka pemberdayaan masyarakat semakin baik hal ini sejalan dengan penelitian (Ababu, *et al*, 2023) yang menyebutkan bahwa partisipasi perempuan dalam berbagai kegiatan pengambilan keputusan dapat meningkatkan pemberdayaan mereka. Partisipasi sebagai element pembedayaan adalah partisipasi masyarakat yang terlibat secara aktif baik fisik maupun psikis bukan hanya memiliki peran secara simbolik (Lovrić & Lovrić, 2018, M Anwas, 2014). Bentuk - bentuk pengambil bagian atau pengikutsertaan (keterlibatan langsung) masyarakat dalam pembangunan pertanian dapat berupa pengambilan keputusan bersama pada semua aktivitas, belajar bersama, menerima manfaat bersama, melakukan monitoring dan evaluasi bersama sama. (Castro,*et al*, 2016). Prasyarat terjadinya partisipasi menurut (Harsanto, *et al*, 2015) adalah (1) adanya kesempatan, (2) ada kemampuan, serta (3) ada kemauan dari masyarakat tersebut.

3. Pengaruh inklusif (X3) terhadap pemberdayaan masyarakat (Y).

Inklusif tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat dengan, nilai t-hitung $0,849 < 1.96$ atau dengan p-value sebesar $0.849 > 0.05$. Besarnya pengaruh adalah -0.012 (-1,2%). Tidak berperan positif menunjukkan bahwa pada proses perencanaan pengembangan kawasan inklusif tidak memainkan peran pada pemberdayaan masyarakat, hal ini terjadi karena tidak terdapat perbedaan kesempatan yang diberikan kepada masyarakat dalam hal ini petani untuk terlibat yang menunjukkan pemberdayaan masyarakat ada untuk semua kelompok masyarakat tanpa membedakan latar belakang status sosial masyarakat/petani. Hal ini terjadi karena masyarakat yang ada pada lokasi pengembangan kopi merupakan masyarakat yang terdiri dari banyak suku yaitu suku jawa, suku penduduk asli Rejang, suku pendatang dari wilayah semendo dan suku pendatang dari

wilayah Bengkulu Selatan. Beragamnya penduduk ini menimbulkan sikap *egaliter* dimana tidak terdapat perbedaan dalam hal kegiatan kegiatan dan kesempatan yang ada dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan.

4. Pengaruh kapasitas kelembagaan lokal (X4) terhadap pemberdayaan masyarakat (Y).

Untuk element Kapasitas kelembagaan lokal Berperan positif signifikan dengan nilai t-hitung $3.667 > 1.96$ atau dengan p-value sebesar $0.000 < 0.05$. Besarnya pengaruh adalah 0.228 (22,8%) terhadap pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan lokal mempunyai peran pada pemberdayaan masyarakat. Semakin baik kapasitas kelembagaan lokal yang ada pada kawasan pengembangan pertanian maka pemberdayaan masyarakat semakin baik yang menunjukkan bahwa kelompok kelompok masyarakat yang tergabung pada kelembagaan lokal ini mempunyai kemampuan ketika di libatkan dalam proses perencanaan pengembangan kawasan kopi. Kesempatan terlibat ini yang harus diberikan kepada kelembagaan lokal yang ada yang menunjukkan adanya kepercayaan pemerintah pada kelembagaan lokal untuk terlibat pada proses perencanaan pengembangan kawasan. Temuan ini menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan lokal memainkan peran penting dalam memfasilitasi pembelajaran, pengelolaan sumber daya dan advokasi untuk peningkatan kapasitas petani yang berpengaruh pada pemberdayaan petani. Secara konseptual ini sejalan dengan Uphoff, 1992 dan Ostrom, 2005, dimana disebutkan bahwa kelembagaan lokal merupakan pilar utama dalam pembangunan dan pemberdayaan berkelanjutan.

5. Pengaruh pemberdayaan masyarakat (Y) terhadap perencanaan pengembangan kawasan kopi (Y1).

Pemberdayaan masyarakat berperan positif signifikan dengan nilai t-hitung $19.069 > 1.96$ atau dengan p-value sebesar $0.000 < 0.05$. Besarnya pengaruh adalah 61,1% yang menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat mempunyai pengaruh pada proses perencanaan pengembangan kawasan. Keberhasilan perencanaan kawasan di pengaruhi adanya pemberdayaan masyarakat. Semakin baik pemberdayaan masyarakat memainkan peran pada proses perencanaan pengembangan kawasan maka implementasi perencanaan

kawasan juga menunjukkan hasil yang juga makin baik. Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan timbal balik (*reciprocal relationship*) dimana pada kondisi masyarakat yang berdaya cenderung lebih aktif, kritis dan bersifat membangun dalam proses perencanaan. Pemberdayaan tidak hanya tentang menjadi hasil, tetapi menunjukkan prasyarat bagi perencanaan partisipatif yang efektif. Hal ini sejalan dengan pendekatan *empowerment-based planning* yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan (Friedman, 1992).

6. Pengaruh Perencanaan pengembangan kawasan kopi (Y1) terhadap keberhasilan pengembangan kawasan (Y2).

Kondisi yang di temukan berdasarkan hasil data ini terlihat bahwa perencanaan pengembangan kawasan berperan positif terhadap keberhasilan pengembangan kawasan dengan nilai t-hitung $69,087 > 1.96$ atau dengan p-value sebesar $0.000 < 0.05$. Besarnya pengaruh adalah 0,836 (83,6%). Nilai ini menunjukkan bahwa ketika perencanaan kawasan dilakukan dengan menyertakan pemberdayaan pada proses perencanaan pengembangan kawasan menghasilkan dokument perencanaan kawasan yang sesuai dengan kebutuhan petani, sesuai dengan potensi dan permasalahan yang ada, Sehingga ketika dokumen ini disusun sesuai kebutuhan petani menimbulkan kondisi dimana mereka merasa bahwa apa yang direncanakan menjadi bagian dari tujuan dan kepentingan mereka sebagai upaya pengembangan kawasan pertanian untuk pembangunan pertanian yang tujuan akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan petani sehingga rencana dari pengembangan kawasan yang disusun akan diupayakan dijalankan secara baik oleh masyarakat dalam hal ini petani yang menjadi bagian dari subjek pembangunan pertanian di kawasan ini.

2.8. Peran Pemberdayaan Pada Perencanaan Kawasan Pertanian Kopi

Tujuan ketiga dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana pemberdayaan memperbaiki proses perencanaan pengembangan Kawasan kopi. Sistem perencanaan pembangunan nasional memberlakukan empat pendekatan proses perencanaan yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif dan top-down bottom up. Sebagai proses politik, musyawarah dalam perencanaan wilayah

desentralisasi merupakan dialog politik dari bermacam macam kepentingan kelompok masyarakat, termasuk kepentingan kepala wilayah pemerintahan. Pendekatan teknokratik digunakan untuk memberi dasar hukum sebagai aspek legal dan memberi kerangka dan metoda ilmiah sebagai rationalitas keputusan perencanaan yang akan dihasilkan, Perencanaan wilayah desentraliasai melibatkan sebanyak mungkin pihak dalam proses komunikasi, karena perencanaan dalam proses sosial memberi kesempatan yang sama kepada semua pemangku kepentingan untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam proses perencanaan wilayahnya. Pendekatan pendekatan perencanaan wilayah tersebut dapat dilihat pada tabel 25.

Tabel 25. Pendekatan dalam sistim perencanaan pembangunan.

Pendekatan	Uraian	Keterangan
Politik	Penjabaran dari agenda pembangunan yang ditawarkan saat kampanye pemilihan kepala daerah/desa	Visi dan misi calon kepala daerah/desa
Teknokratik	Menggunakan kerangka dan metode ilmiah oleh lembaga fungsional yang bertugas untuk itu	Petunjuk teknis dan pedoman dari nasional, provinsi dan kabupaten
Partisipatif	Melibatkan sebanyak mungkin pihak atau pemangku kepentingan	Melibatkan banyak unsur masyarakat dan pelaku pembangunan
Top Down Bottom up	Menyelaraskan rencana melalui musyawarah secara berjenjang menurut tingkat pemerintah	Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)

Sumber: UU No.25/2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dengan pendekatan pemberdayaan maka di harapkan perencanaan dilakukan dengan kesadaran dari masyarakat dengan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dilakukan secara sadar tanpa ada paksaan terlibat sejalan dengan di sampaikan Hernimawati *et al.*, (2018) Pemberdayaan masyarakat menumbuhkan prakarsa dan kreativitas serta peran serta masyarakat, dengan demikian pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang adalah pembangunan yang berdasarkan pemikiran, masukan dan kebutuhan masyarakat sehingga pembangunan yang dilakukan akan lebih bermanfaat dan tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri atau dengan kata lain tepat sasaran.

Proses perencanaan wilayah desentralisasi secara umum dilaksanakan melalui tahapan kegiatan berikut:

1. Mengidentifikasi masalah dan kesempatan pembangunan;
2. Mengidentifikasi alternatif pemecahan masalah;
3. Menyusun alternatif pemecahan masalah dan penyelesaian konflik yang mungkin muncul;
4. Menyusun rancangan mobilisasi sumberdaya;
5. Menyusun program dan proyek pembangunan;
6. Pelaksanaan rencana
7. Pengawasan dan evaluasi

Tahapan tahapan tersebut sekaligus menunjukkan siklus perencanaan. Berdasarkan siklusnya, tahapan tersebut diatas dilaksanakan dalam dua periode waktu musrenbang, yaitu musrenbang tahun berjalan (Musrenbang T) dan musrenbang tahun berikutnya (Musrenbang T+1). Musrenbang T membahas tahap perencanaan (1) sampai (5). Sedangkan musrenbang T+1 membahas tahapan (6) dan (7). Penilaian terhadap pelaksanaan program dan proyek pembangunan tahap (6) dan (7) merupakan materi persiapan dan proses memulai identifikasi masalah untuk kegiatan musrenbang tahun berikutnya.

Bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan atau dapat dilakukan dalam mengawal perencanaan pengembangan kawasan antara lain berupa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat aktif pada saat pertemuan. Ruang kesempatan ini bisa terjadi tentu saja setelah masyarakat luas mendapatkan informasi mengenai rencana penyusunan master plan dan atau *action plan* mengenai pengembangan kawasan. Informasi yang didapatkan oleh masyarakat bisa melalui pihak pertama yaitu OPD Teknis terkait seperti Dinas pertanian. Bisa secara langsung di sampaikan melalui pertemuan pertemuan rutin yang dilakukan oleh kelompok tani atau dapat juga melalui penyuluh pertanian yang mendampingi secara rutin kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tani. Informasi bisa juga langsung dari ketua kelompok dimana setelah ketua kelompok mendapatkan informasi dari kegiatan di Kabupaten melalui Dinas Terkait, informasi ini dapat dengan baik tersalurkan jika ketua menyadari pentingnya anggota kelompok mendapatkan informasi dan ketua mau berbagi

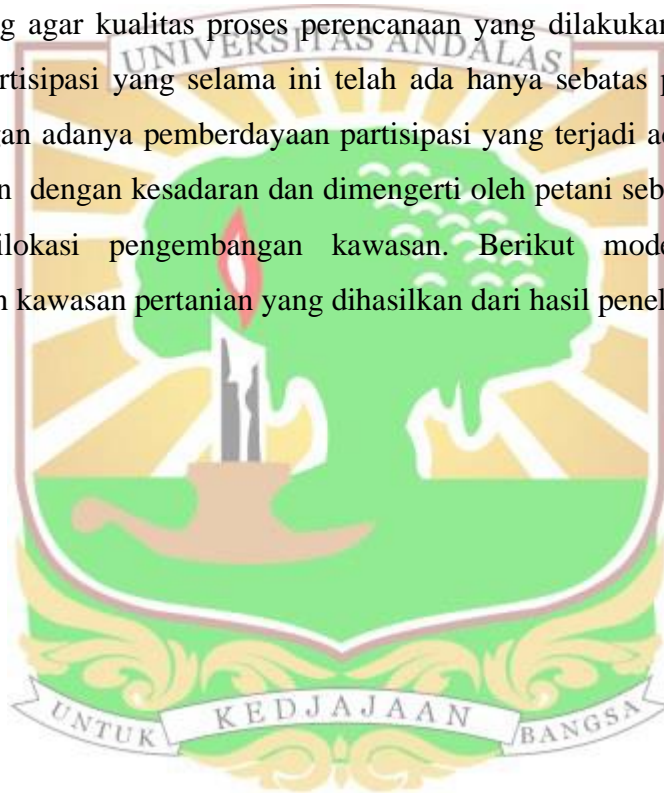
informasi dengan pihak lain. Pada saat informasi tidak diterima dengan baik oleh anggota kelompok inilah yang kemudian menjadi sumbatan informasi dan pengetahuan untuk masyarakat umum sehingga menjadi sulit bagi mereka untuk terlibat aktif dalam kegiatan kegiatan penyusunan perencanaan pengembangan kawasan, karena mereka tidak menerima informasi yang seharusnya mereka dapatkan.

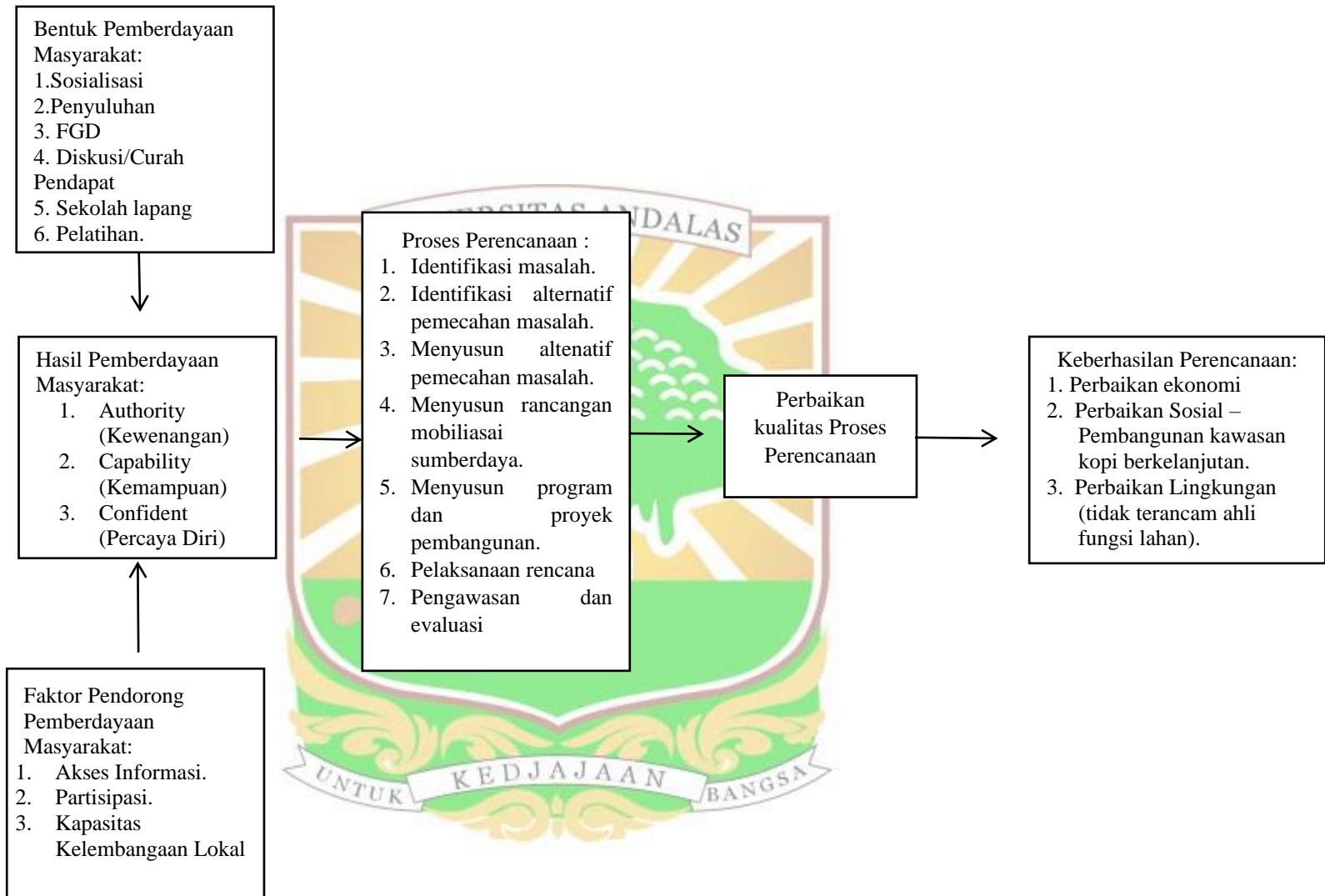
Bentuk lain dari pemberdayaan yang dapat mendukung proses perencanaan pengembangan kawasan ini adalah melalui sosialisasi rencana pengembangan kawasan yang dapat dilakukan secara berkelompok ataupun dilakukan secara cluster di tingkat desa atau juga di tingkat kecamatan. Kegiatan penyuluhan juga merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan atau kapasitas petani dan menumbuhkan kepercayaan diri petani untuk mampu tampil dan menyampaikan pendapat. Bentuk lain pemberdayaan yang dilakukan berdasarkan temuan penelitian berupa kegiatan FGD (Fokus Grup Diskusi), curah pendapat, sekolah lapang dan pelatihan dengan tujuan peningkatan kapasitas atau kemampuan petani dan bertujuan menumbuhkan kepercayaan diri petani.

Pada pembahasan tujuan pertama dan tujuan kedua juga didapatkan hasil bahwa pemberdayaan memainkan peranan yang penting dalam keberhasilan perencanaan pengembangan kawasan kopi. Terlihat dari hasil analisa dengan menggunakan alat analisis SEM ditemukan data 61,1% pemberdayaan berperan positif terhadap keberhasilan perencanaan pengembangan kawasan kopi. Pada hasil analisis juga ditemukan dari 4 variabel yang diidentifikasi berpengaruh pada pemberdayaan, setelah dianalisis ditemukan bahwa ada 3 variabel yang berpengaruh positif signifikan yang menjadi faktor - faktor pendorong pemberdayaan. Faktor-faktor pendorong pemberdayaan ini meliputi akses informasi berperan positif 18,7% terhadap pemberdayaan. Hal ini menunjukkan bahwa akses informasi terkait perencanaan pengembangan kawasan kopi penting didapatkan oleh petani. Informasi dipandang sebagai sumberdaya untuk memperkuat kemampuan petani. Partisipasi berpengaruh 31,9% terhadap pemberdayaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi petani maka pemberdayaan petani makin baik. Pemberdayaan akan berpengaruh pada kualitas

proses perencanaan. Untuk variabel selanjutnya yaitu kelembangaan lokal berpengaruh 22,8% terhadap pemberdayaan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kelembangaan lokal yang baik akan meningkatkan kewenangan petani pada usulan kegiatan, Kemampuan dan juga kepercayaan diri petani bahwa mereka mempunyai kemampuan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan yang selama ini disusun dengan sistim top down dan bottom up dan berdasarkan teknokrat ternyata perlu dievaluasi untuk dapat menjadikan pemberdayaan menjadi bagian yang penting pada setiap tahapan proses perencanaan pengembangan kawasan pertanian. Hal ini penting agar kualitas proses perencanaan yang dilakukan dapat menjadi lebih baik. Partisipasi yang selama ini telah ada hanya sebatas partisipasi semu sehingga dengan adanya pemberdayaan partisipasi yang terjadi adalah partisipasi yang dilakukan dengan kesadaran dan dimengerti oleh petani sebagai masyarakat yang ada dilokasi pengembangan kawasan. Berikut model perencanaan pengembangan kawasan pertanian yang dihasilkan dari hasil penelitian.





Gambar 9. Model Perencanaan Pengembangan kawasan Kopi berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pada Gambar 16. Model perencanaan pengembangan kawasan kopi berbasis pemberdayaan masyarakat sebagai temuan dari hasil penelitian, dapat kita ketahui bahwa pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh faktor pendorong berupa adanya akses informasi mengenai perencanaan pengembangan kawasan kopi yang diterima oleh petani di lokasi kawasan pengembangan secara jelas. Informasi yang jelas diterima ini menimbulkan kesadaran untuk petani dapat berpartisipasi secara aktif pada kegiatan penyusunan perencanaan pengembangan kawasan kopi.

Faktor pendorong selanjutnya adalah partisipasi yang secara positif signifikan berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan pengaruh pada pemberdayaan masyarakat. Partisipasi yang dimaksudkan tentu saja partisipasi aktif yang berdasarkan kesadaran penting terlibat pada perencanaan pengembangan kawasan kopi. Faktor pendorong lainnya adalah adanya kapasitas kelembagaan lokal. Kapasitas kelembagaan lokal menjadi pendorong pemberdayaan. Kapasitas kelembagaan lokal berperan penting dalam memfasilitasi pembelajaran, pengelolaan sumberdaya dan advokasi dalam rangka peningkatan kapasitas petani yang berpengaruh pada pemberdayaan petani.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, FGD, Diskusi/Curah pendapat, sekolah lapang dan pelatihan diharapkan mampu menimbulkan kemampuan, kepercayaan diri petani sehingga petani dapat mempunyai kewenangan yang menunjukkan keberdayaan petani untuk terlibat pada proses perencanaan pengembangan kawasan kopi. Pemberdayaan pada proses perencanaan pengembangan kawasan kopi yang dilakukan ini berupaya untuk memperbaiki kualitas proses perencanaan pengembangan kawasan kopi yang hasilnya adalah keberhasilan perencanaan.

Jadi perencanaan pengembangan kawasan berbasis pemberdayaan masyarakat berimplikasi terhadap perbaikan kualitas proses perencanaan dan bagi pemerintah perlu kedepannya perlu melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengembangan kawasan kopi.